



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang disusun secara sistematis dan terukur guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan, Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 31 Desember 2025

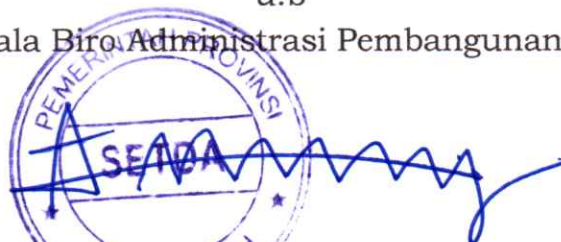
a.n SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah



TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT

Pembina Tingkat I

NIP 197301031999031010

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, 31 Desember 2025

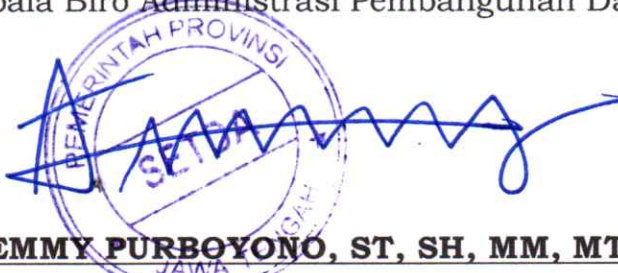
a.n SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah



TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 197301061999031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda	46
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	56
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2. Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah.....	65
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.....	72
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	72
4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	100
4.3. Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026.....	124
V. PENUTUP	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d 2025.....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	39
Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	50
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	64
Tabel 3.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	66
Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah.....	89
Tabel 4.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	101
Tabel 4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026.....	125
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renja yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada RKPD serta berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran pentahapan tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.

Selain itu, dokumen renja Setda tahun 2026 disusun mempedomani RPJPD Tahun 2025-2045 dan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2026, dan memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025. Selain itu juga untuk mengakomodir visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan periode Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan daerah yang semakin dinamis ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam menopang upaya transformasi agar dapat bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Setda untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen sistem pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku unsur pendukung urusan pemerintahan daerah. Penyusunan Renja Setda Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Setda yaitu “Meningkatkan Kualitas Kebijakan daerah” dengan sasaran yaitu Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil.

Renja Setda dalam pelaksanaan program pembangunan daerah menjadi dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi disertai alokasi pembiayaannya yang tepat dan terarah. Guna menjamin kesesuaian kinerja program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Oleh karena itu, dokumen Renja Setda Tahun 2026 sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), selanjutnya setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD akan dituangkan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2026.

Perumusan rencana program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan berikut indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 mengikuti dinamika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029
25. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 000.7.2.4/0000932 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Daerah, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Setda adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa selama tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 30 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp594.975.083.000,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
 - 1.2. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - 1.3. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Program Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - 2.2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - 2.3. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dari 3 kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 3.2. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 3.3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
4. Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

- 4.2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- 4.3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- 4.4. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
5. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 5.2. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - 6.2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 6.3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
7. Program Penataan Organisasi terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
 - 7.1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 7.2. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
8. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 13 kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.10. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1.11. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 1.12. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - 1.13. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d 2025

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	95,00	100,00
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan											
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	60	10	8	8	100,00	8	4	16	26,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan											
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah											
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	100,00	105,26
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah											
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	45	3	3	3	100,00	3	1	6	13,33
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan											
		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase layanan fasilitas KDH dan DPRD	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	100,00	105,26
	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD											
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	115	45	45	46	102,22	45	38	91	79,13

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan											
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	111	39	37	37	100,00	37	12	74	66,67
		Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	100,00	105,26
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah											
		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	100,00	105,26
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah											
		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	30	16	9	10	111,11	10	6	22	73,33
		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	18	1	5	5	100,00	6	2	11	61,11
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	100,00	105,26
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta											
		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	21	6	6	6	100,00	4	2	10	47,62
		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	15	16	4	4	100,00	4	2	8	53,33
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	100	95	100	105,26	95,00	50,00	100,00	105,26
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama											
		Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
		Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	95	81	81	100,00	83,00	30,00	83,00	97,65
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar											
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang											
		Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	24	3	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	4	33,33
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang											
		Jumlah Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	24	3	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang											
		Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	24	3	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	95	82	82	100,00	84,00	40,00	84,00	98,82
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar											
		Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata											
		Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	24	3	8	8	100,00	8	4	16	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	24	3	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	24	3	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	42	54	54	100,00	60,00	20,00	60,00	95,24
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual											
		Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual											
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	2400	3	750	2033	271,07	800	460	3634	151,42
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual											
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	1	1	1	100,00	1	1	1	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	24	10	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	100	96	100	104,17	96,00	46,30	102,00	106,25
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum											
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah											
		Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	36	14	11	17	100,00	12	15	39	108,33
		Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	600	200	200	200	154,55	200	148	540	90,00
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	100	96	100	104,17	96,00	51,42	100,00	104,17
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum											
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM											
		Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM	Dokumen	-	-	-	0	-	0	0	0	
		Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten /Kota	105	35	35	35	100,00	35	18	70	66,67
		Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	21	8	12	18	150,00	12	19	78	371,43
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	97	100	96	100	104,17	97,00	84,00	100,00	103,09
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya											
		Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	8	28	77,78
		Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	8	30	83,33
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan											
		Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	8	26	72,22
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan											
		Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	7	25	69,44
		Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	36	15	12	12	100,00	12	8	26	72,22
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	100	96	100	104,17	97,00	60,00	103,00	107,29
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan											
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	42	12	12	12	100,00	12	6	24	57,14
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota											
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	345	120	120	210	175,00	115	59	376	108,99

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	360	116	127	243	191,34	120	74	448	124,44
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	360	117	120	200	166,67	120	76	372	103,33
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	96	85	97,33	114,51	85,00	48,00	96,00	112,94
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam											
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											
		Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air											
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	95	85	99,3	116,82	85,00	53,39	88,14	103,69
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam											
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup											
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup											
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	90	87	89,01	102,31	87,00	28,26	90,22	103,70
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam											
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	6	3	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan											
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	12	4	4	4	100,00	2	1	8	66,67
		Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	83	83,33	81	81	100,00	82,00	35,00	82,00	98,80
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	6	5	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi											
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	12	6	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	87	85	85	85	100,00	86,00	35,00	86,00	98,85
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD											
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	6	4	85	85	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha											
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan											
		Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	12	2	4	4	100,00	4	1	8	66,67
		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	57	55	55	55	100,00	56,00	47,00	56,00	98,25
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD											
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	6	4	2	2	100,00	2	1	4	66,67
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan											
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	85	86	83	83	100,00	84,00	55,00	84,00	98,82
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian											
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	12	2	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro											
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	24	4	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	15	2	4	4	100,00	4	2	8	53,33
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro											
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	24	4	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	77	78	78	100,00	79,00	35,00	79,00	98,75
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian											
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	14	2	4	4	100,00	4	2	8	57,14
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro											
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	24	4	8	8	100,00	8	2	16	66,67
		Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	12	3	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	24	4	8	8	100,00	8	2	16	66,67
5	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
		Persentase fasilitas pengadaan barang/jasa	%	92	95	90	79,07	87,86	91,00	52,74	92,39	100,42
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	12	5	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah fasilitas perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	6	2	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	83	92	81	81,25	100,31	82,00	42,56	83,22	100,27
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	6	4	2	2	100,00	2	1	4	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	85	90	80	80,33	100,41	82,00	54,92	86,37	101,61
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik											
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik											
		Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	12	12	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	6	12	2	2	100,00	2	1	4	66,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa											
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	4	4	100,00	4	2	8	66,67
6	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI											
		Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	74	155,37	66	66	100,00	70	35	70	94,59
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	3	2	4	4	100,00	1	0	5	166,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi											
		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	12	8	4	4	100,00	3	1	4	33,33

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	6	-	2	2	100,00	1	0	2	33,33
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	91,43	80	85,71	85,71	100,00	88,57	42,86	88,57	96,87
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	6	4	4	4	100,00	2	1	6	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota											
		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	93,88	87,80	88,1	92	104,43	90,00	30,00	96,00	102,26
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan											
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	3	2	4	4	100,00	1	0	5	166,67
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan											
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	12	8	4	4	100,00	4	2	5	41,67
		Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	82	95,92	60	61,22	102,03	36,59	18,59	36,59	44,62
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja											
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	6	8	4	4	100,00	2	1	6	100,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi											
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	20	94,28	14,29	48,57	339,89	48,57	24,28	48,57	242,85
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	9	3	4	4	100,00	3	1	7	77,78
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi											
		Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	71,43	85,37	64,28	64,28	100,00	69,05	34,52	95,24	133,33
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja											
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	6	2	4	4	100,00	2	1	6	100,00
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas											
		Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	12	76	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	94	100	50	57,7	115,40	92	46	92	97,87
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja											
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	6	2	4	4	100,00	2	1	6	100,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan											
		Jumlah Fasilitas Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	12	4	4	4	100,00	8	4	12	100,00
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	93,86	100,83	88,73	88,73	100,00	91,01	45,5	91,01	96,96
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja											
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	12	2	4	4	100,00	2	1	6	50,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik											
		Jumlah Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	18	2	6	6	100,00	6	3	7	38,89
7	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
		Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,85	99,45	98,7	99,76	101,07	98,8	40,64	91,68	92,75
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	15	3	4	4	100,00	4	2	8	53,33

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	36	4	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	15	3	4	4	100,00	4	2	8	53,33
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	36	4	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	99,32	95,5	96,58	101,13	95,5	33,17	95,5	100,00
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	15	2	4	4	100,00	4	2	8	53,33
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	24	4	8	8	100,00	4	2	12	50,00
		Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	96.07	85	99,21	116,72	85,00	53,38	98,15	115,47
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	27	8	8	8	100,00	8	4	16	59,26
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	24	8	8	8	100,00	8	4	16	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	27	8	8	8	100,00	8	4	16	59,26
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	24	8	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	24	8	8	8	100,00	8	4	16	66,67
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	24	8	8	8	100,00	8	4	16	66,67
		Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	87	85	85	85	100,00	86,00	90,62	86,00	98,85
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	15	4	4	4	100,00	4	2	8	53,33
	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah											
		Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
		Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	93	93,23	91	93	102,20	92,00	93,29	93,00	100,00
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	3	24	66,67
		Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	100	100	100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	9	4	2	2	100,00	2	0	4	44,44
	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	6	4	2	2	100,00	2	0	4	66,67
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (1)											
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	12	33,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	12	4	4	4	100,00	4	2	9	75,00
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	4	4	4	100,00	4	2	4	33,33
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	4	4	4	100,00	4	4	4	100,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	4	4	4	100,00	4	4	4	100,00
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah											
		Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah											
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Laporan	72	12	24	24	100,00	24	12	48	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	48	12	16	16	100,00	16	8	32	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	100	100	100	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Orang	2700	-	1650	1650	100,00	900	900	1750	64,81
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan											
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan di Bidang Cukai	Orang	24000	8000	8000	8000	100,00	8000	0	8000	33,33
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya											
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	105	12	12	12	100,00	10	2	12	11,43
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	100	100	100	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	3	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	12	12	12	100,00	4	2	8	66,67
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan											
		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	12	33,33
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan											
		Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan											
		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan											
		Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan											
		Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	12	33,33
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan											
		Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
		Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan											
		Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	2	5,56
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawain, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	12	33,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	6	2	2	2	100,00	2	1	6	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel											
		Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	6	2	2	2	100,00	2	0	5	83,33
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	150	50	50	50	100,00	50	25	100	66,67
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya											
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum											
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	6	24	66,67
		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	9	3	3	3	100,00	2	1	4	44,44
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2499	833	833	833	100,00	833	400	2499	100,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	4	4	4	100,00	4	2	8	66,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	546	182	182	182	100,00	182	90	364	66,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel											
		Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	90	30	30	30	100,00	30	10	60	66,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	900	300	300	300	100,00	300	150	600	66,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	51	17	17	17	100,00	17	7	34	66,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	900	300	300	300	100,00	300	150	600	66,67
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RPD Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD periode Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		
						Target Renja PD (periode Tahun 2024)	Realisasi Renja PD (periode Tahun 2024)	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
		Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	2	2	2	100,00	2	2	2	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2)												
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	100	90	90	100,00	90,00	80,00	90,00	100,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	18	8	6	6	100,00	4	0	10	55,56
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	24	4	8	8	100,00	6	3	14	58,33

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024–2026, secara umum tingkat capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah telah berjalan secara efektif dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Pada tingkat program, capaian kinerja Tahun 2024 berada pada kisaran capaian tinggi, di mana hampir seluruh indikator program mampu memenuhi target yang direncanakan. Persentase capaian indikator program menunjukkan konsistensi antara target Renja Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026.

Selanjutnya, pada tingkat kegiatan dan subkegiatan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas indikator kinerja mencapai target sebesar 100 persen, baik dari sisi keluaran (output) berupa dokumen, laporan, maupun fasilitasi kegiatan pemerintahan. Beberapa indikator kinerja lainnya menunjukkan capaian mendekati target, yaitu berada pada rentang capaian tinggi (di atas 90 persen), yang secara umum masih mencerminkan kinerja yang optimal dan dapat diterima.

Capaian kinerja Renja Tahun 2024 tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2024–2026. Persentase realisasi indikator Renstra hingga Tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah berada pada jalur pencapaian yang sesuai dengan target akhir Renstra. Dengan capaian tahunan yang tinggi, maka akumulasi capaian kinerja hingga periode berjalan telah mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

Meskipun capaian kinerja secara umum telah mencapai target, evaluasi juga menunjukkan adanya sebagian kecil indikator dengan capaian yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam penguatan koordinasi, ketepatan waktu pelaksanaan, serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan persentase capaian indikator kinerja, pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dinilai sangat berhasil, serta telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan capaian Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2024 yang tersebar di 9 (sembilan) Biro lingkup Setda yang berada pada unsur pendukung urusan pemerintahan provinsi, secara ringkas sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan ketercapaian kinerja 3 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Efektivitas kerjasama daerah; Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan

- wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti; dan Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Program Kesejahteraan Rakyat
Dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan ketercapaian kinerja 3 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase Capaian Kinerja Program Bidang Pelayanan Dasar, Persentase Capaian Kinerja Program Bidang Pelayanan Non Dasar, dan Persentase Fasilitas Keagamaan Dalam Kondisi Baik.
 3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan ketercapaian kinerja 4 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan; Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi; Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani; dan Persentase kabupaten/kota peduli HAM.
 4. Program Perekonomian dan Pembangunan
Terdapat 8 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% yang dilaksanakan oleh dua Biro Setda, yaitu:
 - a. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan 3 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase capaian kinerja program bidang pertanian; Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan; serta Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur.
 - b. Biro Perekonomian dengan 5 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan; Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan; Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan; Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha; dan Persentase nilai kemandirian BLUD.
 5. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketercapaian kinerja 3 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa; Persentase efektivitas pengadaan secara elektronik; dan Persentase permasalahan kelembagaan UKPBJ dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi
 6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan ketercapaian kinerja 5 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Capaian pelaksanaan APBD; Capaian pelaksanaan APBN; Persentase realisasi bantuan keuangan; Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah; dan Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah.

7. Program Penataan Organisasi

Dilaksanakan oleh Biro Organisasi dengan ketercapaian kinerja 8 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi; Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya; Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif; Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A; Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A; Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan; dan Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan. Sedangkan indikator Persentase kabupaten/ kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB mengalami lonjakan capaian terhadap target kinerja IRB 14,29% sebanyak 5 Kab/Kota terealisasi 19 Kab/Kota atau sebesar 54,29%.

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)

Dilaksanakan oleh 9 Biro lingkup Setda sejumlah 12 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu:

- a. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Organisasi dan Asisten Administrasi.
- b. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Isda dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Pemotda KS dan Asisten Pemerintahan.
- d. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Perekonomian.
- e. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Biro Hukum.
- g. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Kesejahteraan Rakyat.
- h. Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan 2 indikator kinerja Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Administrasi Pembangunan Daerah; dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah.
- i. Biro Umum dengan 3 indikator kinerja Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda; Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan; serta Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah merupakan capaian kinerja Setda yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja

pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Adapun kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2024. Berikut kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
 Provinsi Jawa Tengah 2024

No.	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti *	%			95	95	100	95	Tercapai
2	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%			95	95	100	95	Tercapai
3	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%			95	95	100	95	Tercapai
4	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%			83	85	81	83	Tercapai
5	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non	%			84	85	82	84	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
6	dasar Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%			60	63	54	60	
7	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%			97	97	100	97	Tercapai
8	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kot a yang dikaji	%			96	96	100	96	Tercapai
9	Persentase kabupaten/kot a peduli HAM	%			96	96	100	96	Tercapai
10	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%			87	87	89,01	87	Tercapai
11	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%			85	85	99,3	85	Tercapai
12	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%			85	85	97,33	85	Tercapai
13	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang	%			84	85,00	83	84	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
	diusulkan sebagai kebijakan								
14	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%			79	80	78	79	Tercapai
15	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%			86	87	89,88	86	Tercapai
16	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%			82	83	100,68	82	
17	Persentase nilai kemandirian BLUD	%			56	57	71,78	56	Tercapai
18	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%			91	92	94,78	91	
19	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%			82	85	88,67	82	Tercapai
20	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%			82	83	81,25	82	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
21	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%			70	74	66	70	Tercapai
22	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%			88,57	91,43	85,71	88,57	Tercapai
23	Persentase perangkat daerah yang mengimplemen- tasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%			90	93,88	92	90	Tercapai
24	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%			36,59	82	61,22	36,59	Tercapai
25	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%			48,87	20	54,29	48,87	Tercapai
26	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%			69,05	71,43	64,28	69,05	Tercapai
27	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%			92	94	57,7	92	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
28	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplemen- tasikan standar pelayanan				91,01	93,86	88,73	91,01	Tercapai
29	Persentase capaian pelaksanaan APBD	%			98,8	98,85	99,76	98,8	Tercapai
30	Persentase capaian pelaksanaan APBN	%			95,5	95,5	96,72	95,5	Tercapai
31	Persentase realisasi bantuan keuangan	%			85	85	99,21	85	Tercapai
32	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%			86	87	85	86	Tercapai
33	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%			100	100	100	100	Tercapai
34	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%			100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
35	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%			100	100	100	100	Tercapai
36	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%			100	100	100	100	Tercapai
37	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%			90	90	90	90	Tercapai
38	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%			100	100	100	100	Tercapai
39	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%			100	100	100	100	Tercapai
40	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian,	%			100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
	dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi								
41	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%			100	100	100	100	Tercapai
42	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%			100	100	100	100	Tercapai
43	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%			100	100	100	100	Tercapai
44	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten	%			100	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
					2025	2026			
	Pemerintahan								
45	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%			100	100	100	100	Tercapai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan proyeksi dalam RKPD Tahun 2025.

RKPD Tahun 2026 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”.

Adapun permasalahan Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, yaitu:

1. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka,
3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Reformasi Birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur.
6. Kondusivitas daerah melalui upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan isu dan permasalahan utama unsur sekretariat daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan memiliki fungsi koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

Memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan mampu menghasilkan kinerja yang baik, berikut agenda-agenda penting di lingkup Sekretariat Daerah, antara lain:

- 1) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah;
- 2) Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah
- 3) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Pengiriman delegasi dalam forum UCLG;
- 5) Perluasan kerjasama di bidang pendidikan dengan Turkey atau Mesir;
- 6) Fasilitasi Forum Komunitas peningkatan kerjasama lingkup Luar Negeri (Diaspora);
- 7) Perluasan kerjasama bidang kesehatan dan pariwisata dengan Fujian Republik Rakyat Tiongkok;
- 8) Koordinasi Pencegahan *Bullying* dari aspek Religius;
- 9) Optimalisasi peran Tim Koordinasi Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TKDV);
- 10) Pemenuhan SDM Petugas Haji Daerah;
- 11) Koordinasi Penciptaan/Perluasan Kesempatan Kerja;
- 12) Koordinasi Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah dan Swasta (Revitalisasi BLK)
- 13) Hibah pesantren;
- 14) Penyelenggaraan Jateng Bersholawat;
- 15) Insentif pengajar agama;
- 16) Insentif penghafal kitab;
- 17) Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi;

- 18) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan Produk Hukum Pusat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan di Jawa Tengah;
- 19) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jawa Tengah;
- 20) Fasilitasi penanganan gugatan perkara perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi;
- 21) Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Jawa Tengah;
- 22) Fasilitasi aduan masyarakat terkait permasalahan hukum dan pelanggaran HAM;
- 23) Fasilitasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 24) Mengkoordinasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan pokok;
- 25) Mendorong BUMD agar lebih produktif dan efisien;
- 26) Merumuskan kebijakan ekonomi makro yang adaptif dan berorientasi pada hasil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh dalam mempercepat pemulihan ekonomi;
- 27) Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Jawa Tengah;
- 28) Sinergisitas Pengembangan Geopark Jateng;
- 29) Pemantauan pelaksanaan SPPG untuk program MBG di Jateng;
- 30) Pemantauan capaian Program Daerah yakni Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan, penghapusan hutang petani dan nelayan, program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida, dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
- 31) Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender;
- 32) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog;
- 33) Sosialisasi Migrasi Sistem Tokodaring ke Inaproc;
- 34) Pendampingan UKPBJ menuju tingkat kematangan level 3 (Proaktif);
- 35) Mendukung kegiatan Selapanan Gubernur Jawa Tengah;
- 36) Pengendalian pelaksanaan 136 Program Daerah yang dibarengi dengan pelaksanaan pengendalian APBD/APBN, pengendalian kewilayahan serta pengendalian kinerja Perangkat Daerah;
- 37) Fasilitasi dan koordinasi monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni;
- 38) Dukungan pengendalian program Daerah pembangunan Gelanggang Olah Raga, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan;
- 39) Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 40) Pembinaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- 41) Pembinaan dan penataan kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota;

- 42) Pembinaan dan evaluasi kematangan organisasi dan kualitas kebijakan daerah;
- 43) Pembinaan dan penataan analisis jabatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 44) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah provinsi;
- 45) Pelaksanaan fasilitasi tata laksana pemerintahan;
- 46) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Pengadaan Solar shell pada sebagian komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah;
- 47) Peningkatan fasilitasi komunikasi pimpinan antara lain publikasi dan hubungan media;
- 48) Pemeliharaan barang inventaris secara komprehensif untuk meningkatkan pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat;

2.4 Reviu terhadap RKPD

Mencermati realisasi, tingkat ketercapaian indikator kinerja, kondisi keuangan daerah, kondisi makro ekonomi, dan tantangan berbagai bidang, maka dilakukan reviu terhadap RKPD tahun 2026 yang dituangkan dalam Hasil Analisis Kebutuhan sebagaimana dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Renstra	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu RPD
				2026						2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			2.715.000.000	I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			2.919.557.000
			Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	100%	900.000.000				Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	100%	675.000.000
			Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	780.000.000				Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	558.263.000
			Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100%	1.035.000.000				Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100%	1.686.294.000
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BIRO HUKUM			2.312.898.000	II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BIRO HUKUM			2.856.000.000
			Indeks Reformasi Hukum	92%	843.129.000				Indeks Reformasi Hukum	92%	866.821.000
			Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	96%	490.313.000				Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	96%	516.313.000
			Capaian Pemberian Bantuan Hukum	100%	827.916.000				Capaian Pemberian Bantuan Hukum	100%	1.321.326.000
			Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86%	151.540.000				Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86%	151.540.000
III	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			349.881.025.000	III	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN			422.418.757.000
			Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	85%	825.000.000				Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	85%	600.000.000
			Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	85%	1.725.000.000				Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	85%	650.000.000
			Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	63%	337.709.994.000				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	63%	421.168.757.000

No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Renstra	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu RPD
				2026						2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				7.351.000.000	IV	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.640.000.000
		BIRO PEREKONOMIAN			2.647.952.000			BIRO PEREKONOMIAN			2.660.000.000
			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	80%	347.000.000			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	80%	215.000.000	
			Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ***	85%	797.000.000			Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ***	85%	600.000.000	
			Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ***	87%	818.952.000			Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ***	87%	1.462.912.000	
			Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85%	338.000.000			Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85%	175.870.000	
			Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral ***	85%	347.000.000			Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral ***	85%	206.218.000	
		BIRO BUMD DAN BLUD			2.075.000.000			BIRO BUMD DAN BLUD			1.980.000.000
			Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan ***	1,95%	875.000.000			Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan ***	1,95%	875.000.000	
			Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha ***	2,30%	800.000.000			Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha ***	2,30%	750.000.000	
			Persentase nilai kemandirian BLUD	55%	400.000.000			Persentase nilai kemandirian BLUD	55%	355.000.000	
V	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.325.000.000	V	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.755.000.000
			Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	90,00%	1.525.000.000			Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	90,00%	625.000.000	
			Persentase realisasi bantuan keuangan	86%	1.000.000.000			Persentase realisasi bantuan keuangan	86%	740.000.000	
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	86,5%	300.000.000			Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	86,5%	195.000.000	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	100%	500.000.000			Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	100%	195.000.000	

No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Renstra	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu RPD
				2026						2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.279.314.000	VI	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.781.081.000
			Persentase Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa	92%	1.112.084.000				Persentase Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa	92%	839.176.000
			Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	85%	556.900.000				Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	85%	475.139.000
			Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	83%	610.330.000				Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	83%	466.766.000
VII	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	BIRO ORGANISASI			1.739.028.000	VII	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	BIRO ORGANISASI			2.056.666.000
			Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi ***	71,00%	257.352.000				Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi ***	71,00%	199.101.000
			Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya ***	91,43%	207.400.000				Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan	91,43%	144.920.000
			Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif ***	92,00%	207.800.000				Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif ***	92,00%	164.094.000
			Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A ***	59,52%	140.000.000				Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A ***	59,52%	145.202.000
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ***	71,42%	155.860.000				Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ***	71,42%	120.398.000
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat ***	70,00%	235.160.000				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat ***	71,43%	214.847.000
			Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan ***	93,00%	271.140.000				Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan ***	93,00%	217.896.000
			Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas ***	39,21%	264.316.000				Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas ***	39,21%	850.208.000
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***				257.107.143.000	VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***				275.716.004.000

No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Renstra	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu RPD
				2026						2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BIRO UMUM	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ***	100,00%	218.430.804.000			BIRO UMUM	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ***	100,00%	228.284.149.000
			Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ***	100,00%	8.611.000.000				Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100,00%	10.535.000.000
			Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ***	100,00%	25.760.000.000				Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ***	100,00%	32.173.932.000
		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ***	100,00%	929.526.000			BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100,00%	511.956.000
		BIRO HUKUM	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum ***	100,00%	387.694.000			BIRO HUKUM	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum ***	100,00%	631.018.000
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ***	100,00%	550.000.000			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ***	100,00%	1.630.155.000
		BIRO PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah ***	100,00%	420.524.000			BIRO PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan	100,00%	346.500.000
		BIRO PEREKONOMIAN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ***	100,00%	245.000.000			BIRO PEREKONOMIAN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100,00%	217.884.000
		BIRO BUMD	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ***	100,00%	655.000.000			BIRO BUMD dan BLUD	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ***	100,00%	421.074.000
		BIRO ORGANISASI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ***	100,00%	642.169.000			BIRO ORGANISASI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100,00%	590.064.000
		BIRO ADM. PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ***	100,00%	225.426.000			BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ***	100,00%	204.272.000

No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Renstra	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Lokasi	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu RPD
				2026						2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BIRO PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah ***	100,00%	250.000.000			BIRO PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah ***	100,00%	170.000.000
TOTAL					626.710.408.000	TOTAL					714.143.065.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan usulan kegiatan dari masyarakat karena bukan lembaga teknis. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk ke Setda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (OPD/SKPD) Teknis.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

RKPD tahun 2026 diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's); dan Dokumen perencanaan pembangunan tematik di tingkat daerah.

Prioritas Nasional Tahun 2026, meliputi:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru,
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif,
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesenian, Kesetaraan, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas,
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri,
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan,
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan,
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Arah kebijakan strategis nasional menjadi penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, meliputi: (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (4) Penguatan daya saing; (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; dan (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Terkait arah kebijakan strategis nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merumuskan prioritas pembangunan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2025-2029, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada tema “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”, yang dijabarkan dalam Prioritas Daerah dan fokusnya tahun 2026, antara lain:

1. Prioritas Daerah pertama, Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan Infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Prioritas Daerah kedua, Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Prioritas Daerah ketiga, Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Prioritas Daerah keempat, Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Telaah terhadap hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan di tingkat provinsi Jawa Tengah memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai aspek kebijakan yang saling terkait. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan di tingkat provinsi.

3.1.1. Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dijaga kestabilannya pada level rendah. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Jawa Tengah pada Desember 2024 secara year-on-year (yoy) menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jawa Tengah di Sembilan kabupaten/kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi yoy sebesar 1,67%. Meskipun terjadi peningkatan harga, namun angka ini tidak lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57%.

Selama tiga tahun terakhir, inflasi Jawa Tengah berfluktuasi di kisaran 1,56% hingga 5,63%. Hal ini didorong oleh tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM. Selain itu, meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi juga mendorong laju inflasi. Inflasi kembali terkendali di bawah 3% pada tahun 2023 dan semakin rendah pada tahun 2024. Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2024 (%) sebagaimana Tabel berikut:

Inflasi (yoy)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Jawa Tengah	7,98	8,82	2,73	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56	1,70	5,63	2,89	1,67

Tren penurunan inflasi di Jawa Tengah hingga tahun 2024 memiliki pola yang sama dengan tren penurunan nasional. Hal ini berarti bahwa perilaku inflasi di Jawa Tengah mempengaruhi perilaku dan kinerja inflasi nasional.

Pengendalian inflasi di Jawa Tengah sebagai wujud kinerja antara Pemprov, Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Bulog, BUMD dan stakeholder lainnya, yang dilakukan melalui 2 sisi yaitu sisi hulu dan sisi hilir. Pengendalian sisi hulu antara lain melalui bantuan benih cabai, fasilitasi pupuk bersubsidi, sosialisasi gerakan menanam di pekarangan, pembangunan green house dalam optimalisasi budidaya cabai. Pengendalian sisi hilir dengan cara penyaluran beras cadangan pemerintah (CPP), pemberian subsidi pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran fasilitasi distribusi pupuk pada petani/Gapoktan/ pelaku pangan lainnya, pengawasan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Inovasi dalam pengendalian inflasi di Jawa Tengah antara lain melalui BUMD Jateng Peduli Inflasi, inisiasi pembentukan ekosistem/distribusi cabai/bawang merah, perluasan area greenhouse, penguatan *Early Warning System* harga komoditi, gerakan 1.000 petani peduli inflasi, serta kios TPID Pandawa Kita.

Penghargaan yang diraih dalam pengendalian inflasi Jawa Tengah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah Berkinerja Terbaik kategori provinsi untuk Regional Jawa Bali.

3.1.2. Kualitas Sumber Daya Manusia, meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga
- 5) Meningkatkan literasi masyarakat dan peningkatan minat baca masyarakat.
- 6) Meningkatkan pembangunan kepemudaan yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda
- 7) Meningkatkan pemajuan kebudayaan.
- 8) Meningkatkan harmoni sosial antar pemeluk agama, suku dan ras.
- 9) Meningkatkan pembangunan berbasis gender.
- 10) Meningkatkan ketahanan keluarga.
- 11) Penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif.

Pemerintah semakin fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia karena perannya yang sangat penting. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu daerah,

digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi standar dalam menilai kualitas sumber daya manusia. IPM mencakup tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga memungkinkan perbandingan antarwilayah.

Dalam penghitungan IPM, tahun 2020 hingga 2023 menggunakan 2 metode, khususnya pada penghitungan komponen Umur Harapan Hidup (UHH) berbasis data hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan data hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Hasil penghitungan UHH Jawa Tengah tahun 2024 dengan basis data hasil proyeksi penduduk hasil SP2020 tercatat sebesar 74,91 tahun, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 74,69 tahun. Sementara penghitungan UHH berbasis hasil Long Form SP2020 menghasilkan angka yang sama, yaitu sebesar 74,69 tahun di tahun 2023. Pada level provinsi hasil penghitungan UHH menunjukkan angka yang sama, namun di level Kabupaten Kota terlihat ada perbedaan angka hasil penghitungan UHH. Angka ini tidak untuk diperbandingkan namun disandingkan sebagai pengetahuan, bahwa telah dilakukan penghitungan UHH dengan metode dan sumber data yang berbeda.

Sedangkan untuk penghitungan komponen Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menggunakan sumber yang sama yaitu Survei Sosial Ekonomi (Susenas).

Pada gambar di atas terlihat bahwa trend IPM baik di Jawa Tengah maupun secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, IPM Jawa Tengah naik 0,65 poin menjadi 73,87 dari sebelumnya 73,39. Kenaikan ini sedikit melambat jika dibandingkan pada tahun 2023 yang naik 0,81 poin, demikian pula tahun 2022 yang naik 0,87 poin. Semakin meningkatnya nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional.

Sementara itu capaian IPM menurut Kabupaten/Kota, di tahun 2024 rata-rata mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Adapun nilai IPM dengan status sangat tinggi dicapai oleh Kota Salatiga sebesar 85,72, lalu diikuti dengan Kota Semarang sebesar 85,24, Kota Surakarta 84,41 dan Kota Magelang sebesar 82,15. Sedangkan Kabupaten Pemalang memiliki capaian IPM terkecil sebesar 68,65, diikuti Kabupaten Banjarnegara sebesar 69,62 dan Kabupaten Brebes 70,18. Kota Surakarta mencapai pertumbuhan IPM tertinggi, yakni sebesar 1,21%. Sedangkan Kota Tegal mempunyai pertumbuhan terendah yaitu sebesar 0,57%. Seluruh Kabupaten/Kota meningkat dalam rentang 0,5-1,2%. Data lengkap IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2022	2023	2024
PROVINSI JAWA TENGAH	72,79	73,39	73,88
Kabupaten Cilacap	70,99	71,83	72,38
Kabupaten Banyumas	73,17	73,86	74,52
Kabupaten Purbalingga	69,54	70,24	70,69
Kabupaten Banjarnegara	68,61	69,14	69,60
Kabupaten Kebumen	70,79	71,37	71,93
Kabupaten Purworejo	73,60	74,28	75,11
Kabupaten Wonosobo	68,89	69,37	69,82
Kabupaten Magelang	70,85	71,45	71,99
Kabupaten Boyolali	74,97	75,41	75,96
Kabupaten Klaten	76,95	77,59	78,16
Kabupaten Sukoharjo	77,94	78,65	79,30
Kabupaten Wonogiri	71,04	71,97	72,55
Kabupaten Karanganyar	76,58	77,31	78,11
Kabupaten Sragen	74,65	75,10	75,53
Kabupaten Grobogan	70,97	71,49	72,02
Kabupaten Blora	69,95	70,63	71,39
Kabupaten Rembang	71,00	71,89	72,53
Kabupaten Pati	73,14	73,59	74,10
Kabupaten Kudus	75,89	76,71	77,22
Kabupaten Jepara	73,15	73,85	74,32
Kabupaten Demak	73,36	74,07	74,57
Kabupaten Semarang	74,67	75,13	75,67
Kabupaten Temanggung	70,77	71,33	71,87
Kabupaten Kendal	73,19	73,86	74,34
Kabupaten Batang	69,45	70,20	70,74
Kabupaten Pekalongan	70,81	71,40	71,84
Kabupaten Pemalang	67,19	68,03	68,55
Kabupaten Tegal	69,53	70,23	70,77
Kabupaten Brebes	67,03	67,95	68,46
Kota Magelang	80,39	81,17	82,15
Kota Surakarta	83,08	83,54	84,40
Kota Salatiga	84,35	84,99	85,72
Kota Semarang	84,08	84,43	85,25
Kota Pekalongan	75,90	76,71	77,22
Kota Tegal	76,15	77,02	77,43

3.1.3. Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, meliputi:

- 1) Peningkatan pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 2) Peningkatan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif.
- 3) Peningkatan ketahanan sumber daya air.
- 4) Menurunkan risiko bencana.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam

dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, ketahanan energi, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya

penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

3.1.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, meliputi:

- 1) Penguatan birokrasi yang adaptif.
- 2) Penguatan pemerintahan yang kolaboratif.

Tata kelola pemerintahan yang dinamis atau *dynamic governance* adalah salah satu sasaran daerah yang akan menjadi *mainstreaming* pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah. Tata kelola pemerintahan yang dinamis ini akan dapat terwujud dengan memperkuat pemerintahan yang adaptif dan birokrasi yang kolaboratif. Birokrasi yang dinamis adalah birokrasi yang senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*).

Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Kolaborasi dalam proses pemerintahan untuk pembangunan daerah saat ini menjadi mutlak karena dependensi antar daerah pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antar daerah, namun daerah dengan pemangku kepentingan lainnya pun harus semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung

dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Tujuan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perumusan tujuan dalam memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka ditetapkan dua tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

3.2.2 Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka dirumuskan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pertama Setda, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil.

Sedangkan Tujuan kedua Setda, Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki dua sasaran, yaitu:

- (1). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- (2). Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran Sekretariat Daerah tersebut dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui sejumlah program mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sasaran pada Tujuan Pertama Setda, “Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil” akan dilaksanakan melalui program pada unsur pendukung urusan pemerintahan, yaitu:

- (1). Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- (2). Program Kesejahteraan Rakyat;
- (3). Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- (4). Program Perekonomian dan Pembangunan;
- (5). Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- (6). Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
- (7). Program Penataan Organisasi.

Sedangkan sasaran pada Tujuan kedua Setda, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya

Manajemen Risiko Perangkat Daerah”, keduanya akan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 beserta targetnya dituangkan sebagaimana dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66,4
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	%	29,5
		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	%	44
		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	37
Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	76
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Nilai MRI Perangkat Daerah	Angka	3

3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Sekretarat Daerah pada konteks Strategis, dilakukan proses manajemen risiko level Strategis dituangkan sebagaimana dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

Manajemen Risiko Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MOU tidak terlaksana	12	Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintah dan Kesra	September 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan arah kebijakan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daerah antar Kab/kota	Asisten Pemerintah dan Kesra	November 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani	10	Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum	kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Asisten Pemerintah dan Kesra	Triwulan IV 2026

Renja Setda 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
					daerah			
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	12	Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	NPHD ; Monitoring, evaluasi dan sosialisasi	Asisten Pemerintah dan Kesra	Triwulan II dan IV 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro	12	Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota	- Monev pelaksanaan hasil rekomendasi - FGD pembahasan isu terkini terkait bidang ekonomi makro	Asisten ekonomi Pembangunan	- TW II (Mei) - TW IV (Nopember)

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampuan dan stakeholder terkait	- Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal, diantaranya pada SPPG - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terhadap keamanan pangan seperti diantaranya terhadap bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG	Asisten Ekonomi Pembangunan	- TW I (Maret) - TW II (Juni)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan	12	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD	Asisten Ekonomi Pembangunan	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD	12	Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan	Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan	1. Melaksanakan pemantauan langsung di lapangan secara rutin/berkala 2. Desk validasi data pelaporan	Asisten Ekonomi Pembangunan	2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Evaluasi instrumen pemberian TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah.	Asisten Administrasi	Triwulan III s.d IV
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	Triwulan I 2026

Renja Setda 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
hasil	Administrasi							
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	Triwulan IV 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/pihak lain	10	Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender	Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai	Dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan-peraturan Pengadaan Barang/Jasa	Asisten Administrasi	TW II 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda	12	Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid	Nilai PEKPPP Setda rendah	1. Melaksanakan Konsinyering penyempurnaan instrumen 2. Melakukan Evaluasi berkala pada PEKPPP Setda	Asisten Administrasi	TW III 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa	12	Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.	PAD sewa gedung tidak optimal	Menyusun SOP peminjaman dan Pembayaran sewa	Asisten Administrasi	Semester I Tahun 2026

Renja Setda 2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama	12	Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda	Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal	Melaksanakan konsinyering penyusunan Manajemen risiko	Asisten Administrasi	TW II 2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renja PD Setda telah menggunakan pendekatan *money follow program* dan Tematik, Holistic, Integratif dan Spasial (THIS). Perencanaan dan penganggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Renstra Setda 2025-2029 untuk mendukung tujuan dan sasaran Setda tahun 2026.

Adapun kerangka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berikut dengan target dan pagu indikatif rencana pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI									2.056.666.000	2.116.618.000	Biro Organisasi	
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB					%	71,42	74,28	120.398.000	155.860.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							120.398.000	155.860.000		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota			Dokumen	2	2	120.398.000	155.860.000		
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					120.398.000	155.860.000		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Dokumen	4	4	120.398.000	155.860.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A					%	59,52	66,66	145.202.000	155.000.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							145.202.000	155.000.000		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD			Dokumen	2	2	145.202.000	155.000.000		
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					145.202.000	155.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	4	145.202.000	155.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat					%	71,43	70	214.847.000	300.150.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							214.847.000	300.150.000		
			Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya			Dokumen	2	2	214.847.000	300.150.000		
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					214.847.000	300.150.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	2	2	120.000.000	175.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah unit kerja yang difasilitasi pembangunan zona integritasnya	Unit Kerja	15	15	94.847.000	125.150.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan					%	93	94	217.896.000	336.140.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							217.896.000	336.140.000		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan			Dokumen	2	2	217.896.000	336.140.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan					217.896.000	336.140.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	4	4	217.896.000	336.140.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas					%	39,21	45,75	850.208.000	329.316.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							850.208.000	329.316.000		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik			Dokumen	2	2	850.208.000	329.316.000		
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik					850.208.000	329.316.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	4	4	850.208.000	329.316.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya					%	91,43	91,43	144.920.000	290.000.000		
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							144.920.000	290.000.000		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota			Dokumen	1	1	144.920.000	290.000.000		
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota					144.920.000	290.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	144.920.000	290.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif					%	92	92	164.094.000	227.800.000		
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							164.094.000	227.800.000		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota			Dokumen	1	1	164.094.000	227.800.000		
				Penataan Analisis Jabatan					164.094.000	227.800.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	4	4	164.094.000	227.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi					%	71	72	199.101.000	322.352.000		
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							199.101.000	322.352.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi			Dokumen	2	2	199.101.000	322.352.000		
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi					199.101.000	322.352.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	2	2	189.071.000	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi	Laporan	2	2	10.030.000	122.352.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									1.781.081.000	2.562.950.000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik					%	85	86	475.139.000	654.350.000		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							475.139.000	654.350.000		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa			Dokumen	4	4	475.139.000	654.350.000		
				Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik					130.282.000	223.300.000		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	4	130.282.000	223.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					300.374.000	280.700.000		
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	300.374.000	280.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					44.483.000	150.350.000		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	44.483.000	150.350.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa					%	92	93	839.176.000	1.226.300.000		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							839.176.000	1.226.300.000		
			Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			Dokumen	4	4	529.326.000	920.900.000		
				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					312.326.000	550.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	312.326.000	550.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa					217.000.000	370.900.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	137.000.000	210.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	4	80.000.000	160.600.000		
			Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif			%	75	75	309.850.000	305.400.000		
				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa					309.850.000	305.400.000		
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	165.118.000	220.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	2	144.732.000	85.400.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ					%	83	85	466.766.000	682.300.000		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							466.766.000	682.300.000		
			Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa			Dokumen	4	4	466.766.000	682.300.000		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa					130.063.000	142.300.000		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8	8	130.063.000	142.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa					86.703.000	215.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	4	86.703.000	215.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa					250.000.000	325.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	4	250.000.000	325.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									4.640.000.000	5.520.000.000		
	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral					%	85	85	206.218.000	465.000.000	Biro Perekonomian	

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							206.218.000	465.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral			Dokumen	2	2	206.218.000	465.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					206.218.000	465.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	4	4	206.218.000	465.000.000		
	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup					%	85	85	175.870.000	430.000.000		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							175.870.000	430.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup			Dokumen	2	2	175.870.000	430.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					175.870.000	430.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	4	175.870.000	430.000.000		
	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					%	87	87	1.462.912.000	955.000.000		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam							1.462.912.000	955.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Dokumen	2	2	106.133.000	300.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					106.133.000	300.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	4	106.133.000	300.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan			Dokumen	2	2	125.000.000	315.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					125.000.000	315.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan	Dokumen	4	4	125.000.000	315.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian			Dokumen	2	2	1.231.779.000	340.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					1.231.779.000	340.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	4	231.779.000	340.000.000		
					Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Laporan	2	2	1.000.000.000	-		
	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					%	85	85	600.000.000	1.000.000.000		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							600.000.000	1.000.000.000		
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Dokumen	4	4	600.000.000	1.000.000.000		
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro					600.000.000	1.000.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	4	400.000.000	475.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	4	4	200.000.000	525.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan					%	80	80	215.000.000	485.000.000		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian							215.000.000	485.000.000		
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro			Dokumen	4	4	215.000.000	485.000.000		
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					215.000.000	485.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	4	215.000.000	485.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase nilai kemandirian BLUD					%	55	55,25	355.000.000	430.000.000	Biro BUMD dan BLUD	
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							355.000.000	430.000.000		
			Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD			Dokumen	2	2	180.000.000	215.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					180.000.000	215.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	2	2	180.000.000	215.000.000		
			Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD			Dokumen	2	2	175.000.000	215.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD					175.000.000	215.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	2	2	175.000.000	215.000.000		
	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha					%	2,3	2,5	750.000.000	840.000.000		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							750.000.000	840.000.000		
			Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan			Dokumen	4	4	750.000.000	840.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					750.000.000	840.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan	Dokumen	4	4	400.000.000	420.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	4	4	350.000.000	420.000.000		
	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan					%	1,95	2	875.000.000	915.000.000		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD							875.000.000	915.000.000		
			Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan			Dokumen	4	4	875.000.000	915.000.000		
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					875.000.000	915.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4		400.000.000	425.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4		475.000.000	490.000.000		
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									1.755.000.000	3.325.000.000	Biro Adm Pembangunan Daerah	
	Persentase realisasi bantuan keuangan					%	86	87	740.000.000	1.000.000.000		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							740.000.000	1.000.000.000		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah			Dokumen	4	4	740.000.000	1.000.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah					740.000.000	1.000.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	4	4	370.000.000	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	Laporan	4	4	370.000.000	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN					%	90	91	625.000.000	1.525.000.000		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah							625.000.000	1.525.000.000		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah			Dokumen	4	4	625.000.000	1.525.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					575.000.000	1.325.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	Laporan	12	12	75.000.000	200.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD	Laporan	12	12	225.000.000	475.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD	Laporan	12	12	125.000.000	250.000.000		
					Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan	Laporan	4	4	150.000.000	400.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					50.000.000	200.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	4	4	50.000.000	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan					%	100	100	195.000.000	500.000.000		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							195.000.000	500.000.000		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Dokumen	1	1	195.000.000	500.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					95.000.000	325.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	95.000.000	325.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah					100.000.000	175.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	100.000.000	175.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah					%	86,5	87	195.000.000	300.000.000		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							195.000.000	300.000.000		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			Dokumen	4		195.000.000	300.000.000		
				Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah					195.000.000	300.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4		195.000.000	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									2.919.557.000		Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti					%	100	100	1.686.294.000	1.450.000.000		
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah							1.686.294.000	1.450.000.000		
			Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti			%	100	100	1.214.294.000	700.000.000		
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah					1.214.294.000	700.000.000		
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	8	9	524.294.000	450.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	4	4	690.000.000	250.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
			Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti			%	100	100	347.000.000	300.000.000		
				Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta					347.000.000	300.000.000		
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	4	4	75.000.000	150.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	4	272.000.000	150.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
			Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah			%	95	95	125.000.000	450.000.000		
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					125.000.000	450.000.000		
					Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	4	40.000.000	150.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	4	4	60.000.000	150.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	100	25.000.000	150.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti					%	100	100	675.000.000	1.040.000.000		
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							675.000.000	1.040.000.000		
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ			Dokumen	8	8	675.000.000	1.040.000.000		
				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan					480.000.000	550.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	4	480.000.000	550.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum					90.000.000	220.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	4	90.000.000	220.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Fasilitasi Penataan Wilayah					105.000.000	270.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	4	105.000.000	270.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah					%	100	100	558.263.000	900.000.000		
		Pelaksanaan Otonomi Daerah							558.263.000	900.000.000		
			Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM			Dokumen	3	3	80.000.000	210.000.000		
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan					80.000.000	210.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	80.000.000	210.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
			Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD			%	100	100	100.000.000	240.000.000		
				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD					100.000.000	240.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	7	9	100.000.000	240.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
			Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			%	100	100	378.263.000	450.000.000		
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					378.263.000	450.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	37	378.263.000	450.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									422.418.757.000	334.905.700.000	Biro Kesejahteraan dan Pemgantasan Kemiskinan	
	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar					%	85	86	600.000.000	825.000.000		
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							600.000.000	825.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar			Dokumen	4	4	600.000.000	825.000.000		
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					200.000.000	275.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	4	4	200.000.000	275.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					200.000.000	275.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	4	4	160.000.000	185.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	4	40.000.000	90.000.000		
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					200.000.000	275.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	4	4	157.043.000	185.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Dokumen	4	4	42.957.000	90.000.000		
	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar					%	85	86	650.000.000	1.725.000.000		
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar							650.000.000	1.725.000.000		
			Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar			Dokumen	4	4	650.000.000	1.725.000.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					200.000.000	275.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	4	4	200.000.000	275.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					450.000.000	1.450.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	4	4	200.000.000	450.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Dokumen	4	4	250.000.000	1.000.000.000		
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik					%	63	64	421.168.757.000	332.355.700.000		
		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual							421.168.757.000	332.355.700.000		
			Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan			%	100	100	3.061.700.000	3.905.700.000		
				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					3.061.700.000	3.905.700.000		
					Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Dokumen	1	1	1.206.000.000	2.150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	4	4	1.855.700.000	1.755.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			%	85	85	418.107.057.000	328.450.000.000		
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual					418.107.057.000	328.450.000.000		
					Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan	Dokumen	2	2	250.000.000	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	900	2500	417.857.057.000	328.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM									2.856.000.000	2.955.302.000	Biro Hukum	
	Capaian Pemberian Bantuan Hukum					%	100	100	1.321.326.000	1.058.616.000		
		Fasilitasi Bantuan Hukum							1.321.326.000	1.058.616.000		
			Persentase bantuan hukum yang tertangani			%	100	100	1.321.326.000	1.058.616.000		
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					1.321.326.000	1.058.616.000		
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	12	12	301.326.000	386.802.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Pemberian Bantuan Hukum	Kasus	340	340	1.020.000.000	671.814.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM					Angka	86	87	151.540.000	193.401.000		
		Fasilitasi Bantuan Hukum							151.540.000	193.401.000		
			Persentase Fasilitasi HAM Daerah			%	100	100	58.199.000	98.397.000		
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM					58.199.000	98.397.000		
					Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah	Laporan	4	4	58.199.000	98.397.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani			%	85	85	93.341.000	95.004.000		
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM					93.341.000	95.004.000		
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	20	20	93.341.000	95.004.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Indeks Reformasi Hukum					Angka	92	92,5	866.821.000	1.065.401.000		
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							866.821.000	1.065.401.000		
			Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan			%	30	35	169.967.000	179.829.000		
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya					169.967.000	179.829.000		
					Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	Dokumen	13	14	169.967.000	179.829.000		OPD Provinsi
			Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum			%	91	92	175.530.000	220.545.000		
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya					175.530.000	220.545.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	Dokumen	350	400	175.530.000	220.545.000		OPD Provinsi
			Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan			%	91	92	64.361.000	82.110.000		
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan					64.361.000	82.110.000		
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	250	300	64.361.000	82.110.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan			%	89,5	90	456.963.000	582.917.000		
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan					456.963.000	582.917.000		
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	40	45	456.963.000	582.917.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota					%	96	97	516.313.000	637.884.000		
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							516.313.000	637.884.000		
			Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji			%	96	97	516.313.000	637.884.000		
				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota					516.313.000	637.884.000		
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	125	130	162.480.000	203.580.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II	Dokumen	130	135	179.093.000	217.152.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III	Dokumen	130	135	174.740.000	217.152.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									275.546.004.000	280.130.905.000	Setda Provinsi Jawa Tengah	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda					%	100	100	228.284.149.000	237.635.913.000	Biro Umum	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							103.449.553.000	126.186.917.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	12	103.449.553.000	126.186.917.000		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					100.824.553.000	123.354.417.000		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	100.824.553.000	123.354.417.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.000.000.000	2.200.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	2.000.000.000	2.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					475.000.000	495.000.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	475.000.000	495.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					150.000.000	137.500.000		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	150.000.000	137.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.250.000.000	880.000.000		
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	12	12	1.250.000.000	880.000.000		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					750.000.000	550.000.000		
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	12	750.000.000	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					500.000.000	330.000.000		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	500.000.000	330.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							50.000.000	55.000.000		
			Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah			Laporan	12	12	50.000.000	55.000.000		
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					50.000.000	55.000.000		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	50.000.000	55.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							14.325.000.000	12.457.500.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda			%	100	100	14.325.000.000	12.457.500.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					550.000.000	605.000.000		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	550.000.000	605.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					700.000.000	770.000.000		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	700.000.000	770.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					600.000.000	660.000.000		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	600.000.000	660.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor					175.000.000	192.500.000		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	175.000.000	192.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					300.000.000	330.000.000		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	300.000.000	330.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kunjungan Tamu					9.000.000.000	6.600.000.000		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	9.000.000.000	6.600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.000.000.000	3.300.000.000		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	3.000.000.000	3.300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27.864.338.000	16.170.000.000		
			Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Paket	2		27.864.338.000	16.170.000.000		
				Pengadaan Mebel					1.252.500.000	770.000.000		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	4	1.252.500.000	770.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26.611.838.000	15.400.000.000		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	40	26.611.838.000	15.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39.358.016.000	33.909.093.000		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda			Laporan	12	12	39.358.016.000	33.909.093.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					8.000.000.000	9.900.000.000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	8.000.000.000	9.900.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.200.000.000	1.320.000.000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.200.000.000	1.320.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					30.158.016.000	22.689.093.000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	29.108.516.000	22.001.593.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	12	299.500.000	137.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	2	750.000.000	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							15.350.000.000	14.960.000.000		
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	833		15.350.000.000	14.960.000.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					400.000.000	440.000.000		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	400.000.000	440.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4.000.000.000	4.400.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	182	182	4.000.000.000	4.400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Mebel					100.000.000	110.000.000		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	100.000.000	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.250.000.000	2.200.000.000		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	300	2.250.000.000	2.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8.000.000.000	7.150.000.000		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	17	8.000.000.000	7.150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					600.000.000	660.000.000		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300	300	600.000.000	660.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							26.637.242.000	33.017.403.000		
			Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda			%	100		26.637.242.000	33.017.403.000		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.743.094.000	3.017.403.000		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2		2.743.094.000	3.017.403.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					23.894.148.000	30.000.000.000		
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2		23.894.148.000	30.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol					%	100	100	32.173.932.000	28.336.000.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							238.000.000	110.000.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol			%	100	100	238.000.000	110.000.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					68.000.000	55.000.000		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	68.000.000	55.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					170.000.000	55.000.000		
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	4	170.000.000	55.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							28.564.057.000	26.070.000.000		
			Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol			Laporan	12	12	28.564.057.000	26.070.000.000		
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					24.071.431.000	22.000.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	24.071.431.000	22.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan					4.492.626.000	4.070.000.000		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	12	4.492.626.000	4.070.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Fasilitasi Keprotokolan							3.371.875.000	2.156.000.000		
			Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun			Laporan	1	1	3.371.875.000	2.156.000.000		
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					3.001.846.000	1.980.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	12	12	3.001.846.000	1.980.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					300.000.000	121.000.000		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	12	300.000.000	121.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan					70.029.000	55.000.000		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	1	1	70.029.000	55.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan					%	100	100	10.535.000.000	9.472.100.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							150.000.000	38.500.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			%	100	100	150.000.000	38.500.000		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					150.000.000	38.500.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	150.000.000	38.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40.000.000	44.000.000		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			Laporan	12	12	40.000.000	44.000.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					40.000.000	44.000.000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	40.000.000	44.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							460.000.000	259.600.000		
			Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			%	100	100	460.000.000	259.600.000		
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					400.000.000	193.600.000		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	400.000.000	193.600.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					60.000.000	66.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	60.000.000	66.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah							9.385.000.000	8.580.000.000		
			Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan			%	100	100	9.385.000.000	8.580.000.000		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					4.000.000.000	3.850.000.000		
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	4.000.000.000	3.850.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					3.200.000.000	2.750.000.000		
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	3.200.000.000	2.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					2.185.000.000	1.980.000.000		
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	1.885.000.000	1.650.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan	Paket	12	12	300.000.000	330.000.000		OPD Provinsi
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							500.000.000	550.000.000		
			Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			Laporan	12	12	500.000.000	550.000.000		
				Penyiapan Materi Pimpinan					500.000.000	550.000.000		
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	12	500.000.000	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa					%	100	100	204.272.000	284.420.000	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							204.272.000	284.420.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			%	100	100	204.272.000	284.420.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					180.000.000	254.020.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	180.000.000	254.020.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					24.272.000	30.400.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	24.272.000	30.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan					%	100	100	421.074.000	718.000.000	Biro BUMD dan BLUD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							421.074.000	718.000.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan			%	100	100	421.074.000	718.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					386.283.000	655.000.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	12	240.000.000	375.000.000		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	146.283.000	280.000.000		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					34.791.000	63.000.000		
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	12	12	10.000.000	25.000.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	24.791.000	38.000.000		
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum					%	100	100	631.018.000	610.966.000	Biro Hukum	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							380.622.000	271.440.000		
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum			%	100	100	380.622.000	271.440.000		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					380.622.000	271.440.000		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1000	1100	380.622.000	271.440.000		OPD Provinsi

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							250.396.000	339.526.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum			%	100	100	250.396.000	169.763.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					213.686.000	169.763.000		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	213.686.000	169.763.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					36.710.000	25.587.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	36.710.000	25.587.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan					%	100	100	511.956.000	1.022.000.000	Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							511.956.000	1.022.000.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra			%	100	100	511.956.000	1.022.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					450.000.000	910.000.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12	200.000.000	440.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	250.000.000	470.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					61.956.000	112.000.000		
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	12	12	8.956.000	17.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	53.000.000	95.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat					%	100	100	1.630.155.000	550.000.000	Biro Kesejahteraan dan Pemgantasan Kemiskinan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.630.155.000	550.000.000		

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026	2027	2026	2027		
									Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat			%	100	100	1.630.155.000	550.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					565.120.000	400.000.000		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	565.120.000	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.065.035.000	150.000.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	6	1.065.035.000	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi					%	100	100	590.064.000	855.982.000	Biro Organisasi	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							135.678.000	205.312.000		
			Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi			%	100	100	135.678.000	205.312.000		
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					80.682.000	164.574.000		
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	80.682.000	164.574.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					54.996.000	40.738.000		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	16	54.996.000	40.738.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							454.386.000	650.670.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi			%	100	100	454.386.000	650.670.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					395.969.000	560.000.000		
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	12	207.193.000	330.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	188.776.000	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					58.417.000	90.670.000		
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Dokumen	12	12	20.000.000	35.409.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	38.417.000	55.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah					%	100	100	346.500.000	420.524.000	Biro Adm Pembangunan Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							346.500.000	420.524.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah			%	100	100	346.500.000	420.524.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					331.281.000	345.000.000		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	331.281.000	345.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.219.000	75.524.000		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	15.219.000	75.524.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian					%	100	100	217.884.000	225.000.000	Biro Perekonomian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							217.884.000	225.000.000		
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian			%	100	100	217.884.000	225.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					202.884.000	225.000.000		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	202.884.000	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.000.000			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	15.000.000	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
									2026	2027		
							2026	2027	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									170.000.000	250.000.000	Biro Adm Pembangunan Daerah	
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah					%	100		170.000.000	250.000.000		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							170.000.000	250.000.000		
			Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100		170.000.000	250.000.000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					70.000.000	100.000.000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	70.000.000	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000	150.000.000		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100.000.000	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									714.143.065.000	631.766.475.000		

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen resiko dalam penyusunan Renja Sekretarat Daerah pada konteks Operasional, dilakukan proses manajemen risiko level operasional dituangkan sebagaimana dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
STRATEGIS								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MOU tidak terlaksana	12	Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintah dan Kesra	September 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan arah kebijakan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota	Asisten Pemerintah dan Kesra	November 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani	10	Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum	kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Asisten Pemerintah dan Kesra	Triwulan IV 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	12	Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	NPHD ; Monitoring, evaluasi dan sosialisasi	Asisten Pemerintah dan Kesra	Triwulan II dan IV 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro	12	Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota	- Monev pelaksanaan hasil rekomendasi - FGD pembahasan isu terkini terkait bidang ekonomi makro	Asisten ekonomi Pembangunan	- TW II (Mei) - TW IV (Nopember)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait	- Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal, diantaranya pada SPPG - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terhadap keamanan pangan seperti diantaranya terhadap bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG	Asisten Ekonomi Pembangunan	- TW I (Maret) - TW II (Juni)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan	12	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD	Asisten Ekonomi Pembangunan	2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD	12	Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan	Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan	1. Melaksanakan pemantauan langsung di lapangan secara rutin/berkala 2. Desk validasi data pelaporan	Asisten Ekonomi Pembangunan	2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Evaluasi instrumen pemberian TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah.	Asisten Administrasi	Triwulan III s.d IV
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	Triwulan I 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	Triwulan IV 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/pihak lain	10	Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender	Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai	Dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan-peraturan Pengadaan Barang/Jasa	Asisten Administrasi	TW II 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda	12	Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid	Nilai PEKPPP Setda rendah	1. Melaksanakan Konsinyering penyempurnaan instrumen 2. Melakukan Evaluasi berkala pada PEKPPP Setda	Asisten Administrasi	TW III 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa	12	Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.	PAD sewa gedung tidak optimal	Menyusun SOP peminjaman dan Pembayaran sewa	Asisten Administrasi	Semester I Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama	12	Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda	Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal	Melaksanakan konsinyering penyusunan Manajemen risiko	Asisten Administrasi	TW II 2026
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA								
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai	12	Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian	Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak	Musyawarah dengan para pihak perihal permasalahan substansi kerjasama	Kepala Biro Pemotda KS	Triwulan III 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	12	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	Perubahan trase/desain	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Triwulan IV 2026
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan	12	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD	Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menyusun Surat Edaran kepada OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Triwulan II 2026
BIRO HUKUM								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	penggunaan aplikasi persuratan dengan baik dan benar	Kepala Biro	Triwulan I

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	menyusun SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	Kepala Biro	Triwulan I
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Tidak didaptkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya	12	Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah	1. Monev rutin 2. Pengembangan kompetensi ASN biro 3. Mengalokasikan anggaran untuk menduk kegiatan rumah tangga Biro	Kepala Biro Kesra	TW I, II, III, IV
BIRO PEREKONOMIAN								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	Menurunnya status geopark	12	Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan geopark dengan melibatkan stakeholder mitra (utamanya Badan Pengelola Geopark) - Melakukan promosi Geopark melalui media sosial	Pengarah LHKESDM	- TW II (Juni) - TW IV (Desember)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	15	Penyalahgunaan anggaran	Kerugian APBD	- Melakukan monitoring pelaksanaan SOP terkait Penatausahaan Keuangan - internalisasi nilai-nilai anti korupsi	Kepala Biro Perekonomian	- TW I (Maret) - TW II (Juni)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi	12	Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT	Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana	- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan - Menyelenggarakan asistensi penyusunan RKA/RKP kegiatan DBHCHT - Menyusun bahan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan DBHCHT Kab/Kota	Pengarah Pertanian	- TW I (Januari) - TW IV (Desember)
BIRO BUMD								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)	10	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Keuangan	Kepala Biro BUMD dan BLUD	November 2026
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)	10	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Jasa Aneka Usaha	Kepala Biro BUMD dan BLUD	November 2026
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase nilai kemandirian BLUD	Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD	10	Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD	Tidak berkembangnya kinerja BLUD	melakukan monitoring terkait kebijakan	Kepala Biro BUMD dan BLUD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	Desk tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan	Pengarah BUMD Jasa Aneka Produksi	Triwulan II
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak	Bentuk tim khusus dengan perwakilan dari semua unit terkait	Pengarah BLUD	Triwulan IV
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal	Membuat surat tentang batas pengumpulan laporan	Pengarah BUMD Jasa Anek Usaha	Triwulan IV

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
BIRO ADM. BANGDA								
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi bantuan keuangan	Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu	12	Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan	Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut	1. Percepatan proses verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026 2. Monitoring progres percepatan penyelesaian kegiatan Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Perubahan TA. 2026	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah	TW IV Tahun 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	16	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat	Melakukan pencermatan progres pelaporan pada aplikasi bantuan keuangan kepada desa. Desa mana yang belum sama sekali melaporkan, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke kantor desa tersebut dan dilakukan uji sampel ke lokasi kegiatan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	TW II Tahun 2026
BIRO ORGANISASI								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	12	Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi	Pelayanan publik terganggu	Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kab/Kota secara terstruktur, terukur, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan III dan IV

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	Mempedomani SKJ sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk SKJ manajerial sesuai KepmenpanRB 409/2020, SKJ Jabatan Pelaksana sesuai KepmenpanRB nomor 01/2025, dan SKJ Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Instansi Teknis JF terkait	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan I
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD	Kepala Biro Organisasi	Triwulan IV

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	Fasilitasi penerapan sistem kerja (pembuatan SK Kelompok Kerja dan penyesuaian proses bisnis dan SOP)	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.	Kepala Biro	Triwulan I
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan IV

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Tanda tangan pejabat berwenang pada berita acara perbaikan.	Kasubbag Tata Usaha	Triwulan I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan.	12	Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi.	Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan.	Menyusun dokumen pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional sesuai standar kompetensi.	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan I
BIRO APEJ								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga	12	Peserta pemilihan merasa dirugikan	Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda	Melakukan review dokumen dengan teliti dan cermat antara PPK dan Pokja. - Menetapkan pedoman (petunjuk teknis) standar evaluasi dokumen pemilihan. - Meningkatkan Kompetensi JF PBJ melalui pelatihan, seminar, FGD, dsb.	Kepala Biro APBJ	TW 1 2026
BIRO UMUM								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	12	Kelalaian Penggunaan BMD	Menghambat kegiatan Oprasional	Membeikan bukti surat izin penggunaan kendaraan bermotor	Kepala Biro	Semester I dan Semester II Tahun 2026

4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026

Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah pada tahun 2026 melaksanakan aktivitas riil/agenda dalam mendukung 136 Program Daerah sebagaimana tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan <i>sister province</i>	1. Pengiriman delegasi dalam forum UCLG 2. Pengiriman delegasi untuk pengembangan sister province/kerja sama 3. Memperkuat kerjasama dengan Queensland terkait sektor pendidikan, pertanian, perdagangan, investasi, iptek, perhubungan, pariwisata, pengembangan desa dan kota, serta program kembar yang nantinya dapat di implementasikan di kedua belah pihak 4. Perluasan kerjasama dengan CHUNGCHONGBUK-DO KOREA SELATAN terkait pendidikan dan Tenaga kerja secara umum 5. Perluasan kerjasama bidang kesehatan dan pariwisata dengan Fujian, Republik Rakyat Tiongkok 6. Perluasan kerjasama Teknologi Informasi dengan Taiwan 7. Perluasan kerjasama di bidang pendidikan dengan Turkey atau Mesir	1. Menjadi anggota jejaring kerja sama internasional (UCLG) dan mendapatkan 4 negara mitra baru; 2. Terlaksananya joint working group dengan 3 mitra sister province (CCBD, Queensland dan Fujian); 3. 50 lulusan SMA/SMK di Jateng melanjutkan pendidikan di CCBD Korea Selatan; 4. 1 Dokumen MoU Perpanjangan Sister State dengan Queensland; 5. Kolaborasi Teknologi Medis, Standardisasi Global, Pengembangan Produk Herbal dan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	1. Disdikbud; 2. DPMPSTP; 3. Disperindag; 4. Dinkop UKM; 5. Disporapar; 6. Dinkes; 7. Diskominfo; 8. Biro Kesra; 9. Universitas

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			Farmasi dan Pengembangan Layanan <i>Medical Tourism</i> Unggulan di Jawa Tengah; 6. Kolaborasi Inovasi dan Ekonomi Digital, dan Kemitraan Industri Semikonduktor; 7. Mendapatkan kuota beasiswa Turki/Mesir bagi para pelajar SMA/SMK.			
2.	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)	1. KKN Tematik sesuai kebutuhan Jawa Tengah --> Sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan 44 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jateng	Jumlah perguruan tinggi di Jateng yang menjalin kerjasama pada ruang lingkup pengabdian masyarakat (KKN Tematik)=44 PT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemotdaker	
	Kerjasama dengan Bisnis	Keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah melalui CSR	Penguatan Tata Kelola CSR	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemotdaker	
	Kerjasama dengan Komunitas	Forum Komunikasi Bersama Komunitas		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;	Biro Pemotdaker	

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah		
	Memperkuat Kerjasama Pemerintah	Pembuatan Forum Kepala Daerah Kab/Kota		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemotdaker	
	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	Kerjasama Tematik dengan Kairo-Mesir dan Negara di Eropa	Pengembangan bidang sains & teknologi Pesantren Vokasi dan mendapat kuota 10 beasiswa bagi pelajar/ santri/ tenaga pendidik Jawa Tengah di Mesir dan Eropa	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemotdaker	1. Kesbangpo 2. Biro Kesra 3. Universita 4. KBRI/KJRI
2.	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	1. Penyusunan SK dan Peraturan Gubernur tindaklanjut Perda TJSLP; 2. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor identifikasi pemetaan TJSLP; 3. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor verifikasi data TJSLP; 4. Monitoring dan evaluasi data TJSLP; 5. Pengembangan Aplikasi;	Laporan pelaksanaan tahunan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha Sub Kegiatan:		

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		6. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor Bisnis Forum TJSLP berdasarkan hasil pemetaan (Atas, Menengah, Kecil)				
3	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	1. Pelaksanaan forum diaspora	1 kali Focus Group Discussion	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha	Biro Pemotdaker	1. Kesbangpol 2. Disdikbud 3. Disporapar 4. Disperindag 5. Dinkop UKM 6. KBRI/KJRI 7. Asosiasi Bisnis
4.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Kemenag untuk mendorong pondok-pondok yang belum mempunyai legalitas dalam dalam penerbitan Surat Kelulusan/Ijazah agar dapat diakui Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Indonesia	Teridentifikasinya santri lulusan pondok	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
5	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	1. Pemberian Hibah kepada pesantren	Peningkatan kualitas pesantren dan SDM pesantren Target : 5.364 pesantren / 100.000 santri	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah	Biro Kesra	DinkopUKM Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas ESDM DLHK

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				sarana prasarana Pendidikan keagamaan		
6.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	1. Hibah kepada Kanwil Kemenag Jateng 2. Hibah kepada LPTQ	1. Jumlah pengajar agama yang menerima insentif =230.830 orang 2. Jumlah penghafal kitab (Al Quran) yang menerima insentif =2000 orang	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan	Biro Kesra	
7.	Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi	1. Pemberian hibah kepada lembaga fasilitasi dan sinergi pondok pesantren dan diniyah (luar negeri) 2. Pemberian hibah kepada lembaga fasilitasi dan sinergi pondok pesantren dan diniyah (dalam negeri)	Memenuhi kebutuhan biaya operasional di Madrasah Aliyah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Target : siswa MA volume : 200.000 siswa	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan	Biro Kesra	
8.	BOSDa Madrasah Aliyah	Pemberian BOSDA MA	Jumlah siswa MA yang menerima BOSDa MA = 182.360 siswa	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan	Biro Kesra	

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
9.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Penyelenggaraan Jateng Bersholawat	Terlaksananya Jateng Bersholawat	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesra	
8.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Koordinasi, pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui pertemuan dengan unsur terkait	Laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup lansia	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
9.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	1. Monev ketersediaan <i>daycare</i> untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri; 2. Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada	1. Laporan Monev ketersediaan daycare untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
10.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	100 Perkara	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Kegiatan Bantuan Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum	LBH Kementerian Hukum

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
11.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Laporan Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Perekonomian dan Pembangunan; Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian; Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Biro Perekonomian	Dinas Perindag Dinas Koperasi UKM
12.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	1. Pembinaan dan pengawasan kepatuhan usaha pariwisata ramah muslim	1. Meningkatnya Kualitas destinasi Pariwisata	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dinas Budparekraf	Koordinator Biro Perekonomian
13.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>day care</i> untuk buruh di Kawasan Industri	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator Biro Perekonomian

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
14.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Dinas Perindag Dinas Koperasi UKM
15.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Fasilitasi dan koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Dinas Perindag
16.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	1. Fasilitasi dan Koordinasi Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Laporan Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Biro Perekonomian	Dinas Perindag
17.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	1. Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator Biro Perekonomian

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
18.	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Laporan Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator Biro Perekonomian
19.	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator Biro Perekonomian
20.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	1. Perumusan kebijakan berupa surat edaran untuk BUMD dan BLUD dapat menerima pegawai 3% penyandang disabilitas	Surat Edaran Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD Keuangan	Biro BUMD dan BLUD	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
						- Dinas Ketenagakerjaan
21.	Fasilitasi Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	1. Penyusunan Perda tentang Tata Kelola BUMD (Perda inisiatif DPRD) 2. Penyusunan Pergub tentang ketentuan secara teknis tata kelola bisnis, SOTK hingga SDM 3. Reformasi Struktur Organisasi 4. Peningkatan kompetensi SDM BUMD 5. Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola BUMD	1. Tersusunnya Pergub dan rencana aksi tentang Tata Kelola BUMD 2. Tersusunnya struktur organisasi dan peningkatan kompetensi BUMD	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Keuangan	Biro BUMD dan BLUD	- Biro Hukum
22.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan	Laporan Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan:	Biro Perekonomian	Dinas pertanian dan Peternakan Dinas Ketahanan pangan Biro BUMD, dan BLUD
23.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (<i>E-Commerce</i>)	1. Penyusunan kajian kelayakan bisnis <i>e-Commerce</i> 2. Penyusunan regulasi jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemprov Jateng melalui BUMD (<i>E-Commerce</i>) 3. Fasilitasi dan Koordinasi dalam membuat platform <i>E-Commerce</i>	1. Dokumen kajian kelayakan bisnis <i>e-Commerce</i> ; 2. Dokumen regulasi <i>e-Commerce</i> ; 3. Terbangunnya jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Biro BUMD	- Dinas Perindag - Dinas Pertanian & Peternakan - Biro Perekonomian

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
		(nomor 2 dan 3 dilaksanakan apabila hasil kajian bisnis dinyatakan layak)	Jawa Tengah melalui BUMD (<i>E-Commerce</i>)			
	Biro Adm. Bangda					
24.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	1. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui melalui 1 KK 1 rumah layak huni 2. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan 3. Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga	1. Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui RTLH 2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan 3. Laporan Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Disperakim Dispora Dinas PUPR BPKAD	
25.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Penyusunan Perda dan Pergub tentang kelembagaan eks Bakorwil	Tersusunnya Perda dan Pergub tentang kelembagaan eks Bakorwil	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi	

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
				;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik		
26.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	Penyusunan Kebijakan penggunaan baju adat daerah pada hari kamis minggu pertama dalam 1 bulan sekali, HUT Provinsi Jateng dan acara ceremonial tertentu	Surat Edaran Sekda tentang penggunaan baju adat daerah	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik	Biro Organisasi	
27.	Peningkatan TPP ASN	Penyusunan kebijakan penunjang terkait TPP berbasis kinerja dan kelas jabatan	Jumlah dokumen kebijakan penunjang terkait TPP yang tersusun	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan	Biro Organisasi	BKD BPKAD BAPPEDA
28.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	100 % OPD yang terfasilitasi	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi	
29.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Pertemuan reguler pemerintah provinsi atau Gubernur dengan masyarakat secara langsung di Kantor Gubernur atau Kantor Eks Bakorwil	Terbangunnya gerai rumah rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Biro Umum	

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Penyediaan sarpras untuk kantor eks bakorwil	Tersedianya Sarpras untuk eks bakorwil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Biro Umum	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan rangkaian proses perencanaan tahun pertama Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan penjabaran RKPD tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 mengikuti prinsip *money follows program* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dijabarkan ke dalam RKA sebagai perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan dan menjamin pencapaian target-target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar target-target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2025 diharapkan menjadi titik tolak pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra 2025-2029.

Lampiran 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
STRATEGIS								
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MOU tidak terlaksana	Risiko Strategis	Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	Risiko Strategis	Perbedaan arah kebijakan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	Pemkab/Pemkot, Masyarakat
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani	Risiko Strategis	Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum	kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	Risiko Fraud	Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	Penerima Hibah
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro	Risiko Strategis	Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota"

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan	Risiko Strategis	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 3. Dunia Swasta 4. Petani, Petambak dan Nelayan 5. Masyarakat
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan	Risiko Strategis	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	BUMD dan Pemerintah Daerah
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan	Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	Risiko Strategis	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Tim TPP, Seluruh OPD
10	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	Risiko Strategis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Pemerintah Kab/Kota
11	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	Risiko Strategis	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	OPD, Masyarakat, Pemprov (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/ pihak lain	Risiko Fraud	Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender	Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai	OPD Jateng
13	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan□ perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid	Nilai PEKPPP Setda rendah	Pengguna layanan Setda
14	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan□ perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa	Risiko Fraud	Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.	PAD sewa gedung tidak optimal	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
15	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama	Risiko Kepatuhan	Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda	Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal	Sekretaris Daerah
BIRO PEMOTDAKER								
1	Sasaran Program	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai	Risiko Kemitraan	Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian	Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak	Pemprov, Biro Pemotdaker
2	Sasaran Program	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	Instansi pengusul, masyarakat terdampak, Gubernur
3	Sasaran Program	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan	Risiko Kepatuhan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD	Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pemprov, Biro Pemotdaker

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Laporan pertanggungjawaban disusun tidak sesuai dengan bukti riil	Risiko Fraud	Pemalsuan laporan pertanggungjawaban keuangan	Kerugian finansial daerah	Biro Pemotdaker
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Keterlambatan LKPJ	Risiko Operasional	Data dari OPD tidak lengkap atau lambat masuk	Rekomendasi DPRD tidak optimal, turunnya kepercayaan	Pemkab/Pemkot, Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Masyarakat merasa memiliki Tanah Negara atau Tanah aset milik pemerintah	Risiko Operasional	Terjadi pembiaran penguasaan aset pemerintah oleh masyarakat	Potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum	Masyarakat terdampak, Gubernur
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Gangguan ketertiban di kantor Gubernur	Risiko Operasional	Koordinasi pengamanan yang lemah	Terganggunya pelayanan dan keamanan lingkungan	Pengunjuk rasa, ASN, Pemprov
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Target sertifikasi tanah tidak tercapai	Risiko Operasional	Ketidaksinkronan data pertanahan & keterlambatan kebijakan daerah	Hak atas tanah masyarakat tidak jelas, sengketa tanah	Masyarakat penerima PTSL, Pemprov
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur	Risiko Operasional	Kelengkapan berkas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tertundanya pengesahan PAW DPRD	Biro Pemotdaker, Legislatif
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Perangkat Daerah tidak melaksanakan aktivitas dalam mendukung capaian indikator SPM	Risiko Operasional	Indikator SPM tidak sesuai dengan perencanaan daerah	Capaian indikator SPM dinilai rendah	OPD teknis, Biro Pemotdaker

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Rencana kerja sama tidak sesuai kebutuhan daerah	Risiko Operasional	Analisis kebutuhan belum optimal	Kerja sama tidak berdampak signifikan	Pemprov
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	Ketidakpatuhan terhadap peraturan / kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama	Risiko Kemitraan	Tidak pahamnya OPD Provinsi dan Pemkab/ Pemkot terhadap regulasi kemitraan	Berkurangnya kepercayaan mitra luar negeri terhadap Pemda	Pemprov, Publik
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan kerjasama luar negeri kurang maksimal	Risiko Kemitraan	Kurangnya partisipasi Pemda terhadap pelaksanaan kerjasama	Menghambat aktivitas bisnis dan pembangunan	Pemprov, masyarakat
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	Evaluasi pelaksanaan kerjasama tidak dapat dilakukan	Risiko Operasional	Tidak ada instrumen Monev terkait pelaksanaan kerjasama	Tidak termonitornya pelaksanaan kerjasama di lingkup Pemprov Jawa Tengah	Pemprov
D HUKUM								
1	Sasaran Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	Ketidakhadiran Perangkat Daerah teknis terkait dalam hal pencermatan substansi teknis atau pembahasan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan tidak efektif dalam pelaksanaannya	Risiko Operasional	masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi termasuk dalam menindaklanjuti hasil kajian, analisis dan evaluasi	Banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengalami permasalahan dalam implementasinya	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Risiko Operasional	- Penyampaian draft Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota belum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan - Permohonan fasilitasi dan/atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang terlampau banyak	Uraian proses pemberian fasilitasi dan rekomendasi membutuhkan waktu lebih	Pemerintah Kabupaten/Kota
4	Sasaran Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang bersengketa	Risiko Hukum	Tidak terselesaikannya sengketa hukum masyarakat	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Biro Hukum	Masyarakat pengadu/ teradu
5	Sasaran Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi	Risiko Operasional	Tidak terlaksananya verifikasi permohonan pencairan bantuan hukum	Pemberian bantuan hukum tidak tepat sasaran	Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
6	Sasaran Program	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Rendahnya nilai capaian pelaksanaan Aksi HAM	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman unit kerja terhadap pedoman pelaksanaan dan indikator penilaian Aksi HAM	Nilai capaian Aksi HAM menurun atau tidak mencapai target nasional	Perangkat Daerah terkait
7	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	Risiko Operasional	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	Perangkat Daerah pemrakarsa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan Produk Hukum Pengaturan yang sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	Perangkat Daerah pemrakarsa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan Produk Hukum Penetapan yang sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum	Risiko Operasional	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat	Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen hukum yang tidak tersedia	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan	Risiko Operasional	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat	Potensi kalahnya Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam proses persidangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Hasil analisis dan evaluasi belum banyak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dalam perbaikan produk hukum daerah	Risiko Operasional	Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi	Banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengalami permasalahan dalam implementasinya	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	belum optimalnya pelaksanaan pemantauan/pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota	Raperda/Raperkada yang diajukan belum secara kualitas memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya	Risiko Operasional	belum terdapatnya kesepahaman atas penyusunan/pembentukan produk hukum daerah serta permasalahan-permasalahan menyangkut implementasinya	tidak optimalnya implementasi dari Perda/Perkada yang sudah ditetapkan	Pemerintah Kabupaten/Kota
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase bantuan hukum yang tertangani	Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/ atau kelompok rentan tidak optimal	Risiko Kemitraan	Perbedaan pemahaman dan interpretasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan LBH	Tidak tercapainya kinerja pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/ atau kelompok rentan	Masyarakat miskin dan/ atau kelompok rentan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi HAM Daerah	Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM	Risiko Kepatuhan	Tidak optimalnya pembinaan implementasi kabupaten kota peduli HAM	Kurang optimalnya kualitas pelayanan HAM di kabupaten kota	Masyarakat luas
17	Sasaran Kegiatan	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani	Tidak tertanganinya seluruh permasalahan hukum non-litigasi sesuai target yang ditetapkan	Risiko Operasional	Tidak tersedianya data dan dokumen pendukung dari instansi terkait secara lengkap	Meningkatnya potensi sengketa hukum karena permasalahan tidak terselesaikan secara preventif	Masyarakat pengadu/ teradu
18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait
19	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait, masyarakat
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait, masyarakat
21	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	Perangkat Daerah terkait

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Risiko Operasional	Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang mempedomani target kinerja yg telah ditetapkan pada RKO	Capaian kinerja kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1. Sub Koordinator Sosial (pelaksana) 2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra (KPA) 4. Sekretaris Daerah (PA)
2	Sasaran Program	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	Risiko Operasional	Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang mempedomani target kinerja yg telah ditetapkan pada RKO	Capaian kinerja kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1. Sub Koordinator Sosial (pelaksana) 2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra (KPA) 4. Sekretaris Daerah (PA)
3	Sasaran Program	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	Risiko Fraud	Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	Penerima Hibah
4	Sasaran Program	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA	Risiko Operasional	Banyaknya usulan kegiatan hibah yang tidak didasari dengan data dukung yang lengkap	Hibah tidak dapat dicairkan	Penerima Hibah
5	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya	Risiko Operasional	Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah	Biro Kesejahteraan Rakyat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kelengkapan administrasi hibah kurang lengkap sehingga pelaporan terlambat	Risiko Operasional	Penerimaan Hibah dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran	SPJ Hibah terlambat / tidak sesuai waktu	Biro Kesra

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Realisasi hibah pada akhir periode	Risiko Operasional	Keterlambatan pemenuhan kelengkapan administrasi hibah	Laporan realisasi pencairan hibah melebihi ketentuan	Biro Kesra
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan	Tumpang tindih tugas dan kegiatan yang tidak terlaksana	Risiko Kemitraan	Duplikasi Tugas Pokok dan Fungsi antara Kemenag dengan Biro Kesra	Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana dengan baik	Masyarakat
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Risiko Operasional	Kurang Optimalnya dalam memantau / mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1. Sub Koordinator Sosial, Pendidikan dan Kesehatan (pelaksana) 2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra (KPA) 4. Sekretaris Daerah (PA)
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	Risiko Operasional	Kurang Optimalnya dalam memantau / mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1. Sub Koordinator (pelaksana) 2. Koordinator Non Pelayanan Dasar (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra (KPA) 4. Sekretaris Daerah (PA)
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	Risiko Operasional	Perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur dan pengelolaan yang belum efektif	Rekam jejak aset sulit ditelusuri keberadaannya	Biro Kesejahteraan Rakyat
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	Pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Pegawai Biro Kesra

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BIRO PEREKONOMIAN								
1	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Sinkronisasi program/kegiatan Ekonomi Makro menjadi kurang efektif	Risiko Operasional	Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas	Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan tidak optimal	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan 2. Pemerintah Kab/Kota
2	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sinkronisasi program/kegiatan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM menjadi kurang efektif	Risiko Operasional	Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas	Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan tidak optimal	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi UKM 3. Masyarakat
3	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral tidak dapat diimplementasikan	Risiko Operasional	Data yang dimiliki OPD belum terkompilasi dengan baik	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait	OPD sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
4	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	Menurunnya status geopark	Risiko Kemitraan	Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	1. OPD sektor Pariwisata 2. Badan Pengelola Geopark 3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat wilayah Geopark didalam wilayah administrasinya

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan tidak dapat diimplementasikan	Risiko Operasional	Data yang dimiliki OPD belum terkompilasi dengan baik	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait	OPD sektor Pertanian (Pertanian, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan)
6	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	Risiko Fraud	Penyalahgunaan anggaran	Kerugian APBD	1. ASN lingkup Biro Perekonomian 2. OPD Mitra
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Pengolahan dan penyajian data bidang Ekonomi Makro menjadi kurang efektif dan efisien	Risiko Operasional	Keterbatasan sumber data/pengumpulan data	Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat	Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengolahan dan penyajian data bidang PerindagkopUKM menjadi kurang efektif dan efisien	Risiko Operasional	1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data 2. Human Error (Kurang partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi tim panitia/peserta)	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. 2. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi UKM 3. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Permintaan data/kegiatan prioritas di PerindagkopUKM tidak dipenuhi Kab/Kota	Risiko Operasional	1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas 2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebij akan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. 2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebij akan belum dijalankan oleh kab/Kota	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi UKM 3. Masyarakat
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengolahan dan penyajian data bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kurang efektif dan efisien.	Risiko Operasional	1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data 2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas 3. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebij akan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. 2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal.	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Calon Investor dan Investor 3. Dunia Usaha 4. Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	Risiko Operasional	1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas 2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. 2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebijakan belum dijalankan oleh kab/Kota	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Calon Investor dan Investor 3. Dunia Usaha 4. Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Masyarakat
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	Risiko Operasional	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Dunia Swasta 3. Petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 4. Masyarakat
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi	Risiko Kepatuhan	Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT	Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	Risiko Operasional	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dari hasil panen	Risiko Operasional	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	- Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya	1. Masyarakat 2. Dunia usaha
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tidak sesuai kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	Risiko Operasional	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut	1. Masyarakat 2. Dunia usaha
17	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Penurunan fungsi DAS Prioritas di Jawa Tengah	Risiko Operasional	Kualitas vegetasi, lahan dan air sebagai komponen Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor	OPD ampuan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat
18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor saja	Risiko Operasional	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah oleh OPD yang terlibat dan berkepentingan	Adanya tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan agenda kegiatan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Tengah	OPD ampuan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana	Risiko Operasional	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan	1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota 2. Calon Investor dan Investor 3. Pelaku sektor transportasi, sektor industri, sektor bangunan gedung dan sektor rumah tangga
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro Perekonomian	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip dinamis belum sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku	Terhambatnya layanan kearsipan di Biro Perekonomian	1. ASN lingkup Biro Perekonomian 2. OPD Mitra
BIRO BUMD DAN BLUD								
1	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)	Risiko Fraud	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	BUMD dan Pemerintah Daerah
2	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)	Risiko Fraud	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	BUMD dan Pemerintah Daerah
3	Sasaran Program	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase nilai kemandirian BLUD	Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD	Tidak berkembangnya kinerja BLUD	BLUD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro BUMD dan BLUD	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip tidak sesuai	Terhambatnya layanan kearsipan di Biro BUMD dan BLUD	Biro BUMD dan BLUD
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Pemilihan direksi BUMD Keuangan tidak sesuai keahlian	Risiko Kemitraan	Penunjukan pihak ketiga tidak kredibel	BUMD tidak berkembang	BUMD dan Pemerintah Daerah
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Keterlambatan penginputan laporan kinerja keuangan pada sistem SiPete	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara BUMD dan Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja tidak dapat dilihat dalam sistem	BUMD dan Pemerintah Daerah
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	Risiko Operasional	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	BUMD dan Pemerintah Daerah
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	Risiko Operasional	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak	BUMD dan Pemerintah Daerah
BIRO ADM. BANGDA								
1	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi bantuan keuangan	Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan	Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut	1. Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	Data kinerja pada e-controlling kinerja tidak valid	Risiko Operasional	SKPD belum melengkapi data Kinerja pada Aplikasi e-Controlling Kinerja	Data tidak dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	Agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar SKPD	Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau Program Strategis tidak terjadi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan disimulasikan	Risiko Operasional	Sistem aplikasi belum siap digunakan untuk kegiatan simulasi	Materi yang di sosialisasikan/ didiseminasikan tidak dapat terinformasi secara utuh atau optimal	SKPD Provinsi
5	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	Informasi yang disajikan pada media informasi Biro tidak relevan	Risiko Operasional	Informasi yang disajikan lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah	Pengguna Media / Masyarakat
6	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	Indikator kinerja yang ditetapkan tidak selaras dengan regulasi yang mengatur pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Risiko Operasional	Perubahan SOTK Setda	Kualitas perencanaan Setda kurang baik	Biro-biro lingkup Setda
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap	Risiko Operasional	Tata cara penyusunan RKO belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di SKPD	Waktu pelaksanaan desk menjadi lebih lama/tidak optimal	SKPD Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap	Risiko Operasional	Pagu APBN (Dekon TP) sering terjadi penyesuaian/perubahan menyesuaikan kebijakan Pusat	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Perangkat Daerah kurang melakukan koordinasi internal	RKO (APBD) sebagai bahan pengendalian menjadi tidak valid	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data realisasi fisik APBD kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan user pelaporan e-controlling APBD	Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik	Risiko Operasional	Pelaksana PSN di Jawa Tengah belum memahami pentingnya memberikan laporan progres dan hasil kegiatan secara periodik, kepada Pemprov Jawa Tengah.	Kesulitan dalam menyusun laporan progres pelaksanaan PSN kepada Gubernur	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Target keuangan dan fisik RKO berubah	Risiko Operasional	Perubahan jadwal / pergeseran kegiatan dan anggaran tidak diinformasikan	Penatausahaan ikut berubah (RAK dan SPD), pengendalian kegiatan dan anggaran berpotensi tidak tepat	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid	Risiko Operasional	Pelaksanaan monitoring tidak didampingi oleh personil yang membidangi dan/atau tidak disertai data dukung yang dibutuhkan	Proses monitoring menjadi tidak efektif, efisien dan optimal	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Adanya Kepala Daerah baru atau anggota dewan baru	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Kabupaten/Kota
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi	Risiko Operasional	Kurangnya tingkat partisipasi pengiriman laporan oleh OPD Kab/Kota	Tidak tersedianya data valid yang mencakup seluruh kegiatan sesuai progres di lapangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan	Risiko Operasional	Pelaksanaan monitoring hanya dapat berupa sampling	Hasil data untuk analisis kebijakan menjadi kurang valid	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
17	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Proses verifikasi capaian progress pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat	Risiko Operasional	Bagian Pembangunan Kab/Kota yang hadir dalam Rakor tidak dapat memberikan informasi kendala permasalahan dan progress real time di lapangan	Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Kendala operasional dalam proses updating data pelaksanaan Bankeu secara manual	Risiko Operasional	Belum terfasilitasinya seluruh OPD pengelola kegiatan Bantuan Keuangan pada 35 Kabupaten/Kota	Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
19	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rekomendasi kebijakan teknis tidak dapat disusun karena kurangnya koordinasi lintas OPD	Risiko Operasional	Tidak adanya forum koordinasi reguler dengan OPD Teknis	Rekomendasi kebijakan teknis tidak terpenuhi secara jumlah maupun substansi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
21	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan	Risiko Operasional	Terdapat perbedaan persepsi pada pengampu evaluasi masing-masing Biro	Laporan hasil evaluasi tidak dapat digunakan secara optimal sebagai bahan perbaikan kinerja periode berikutnya	Biro-biro lingkup Setda
22	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Hilangnya aset	Risiko Fraud	Penyalahgunaan aset	Reputasi Biro Bangsa menjadi kurang baik	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
23	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	Risiko Operasional	Perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur dan pengelolaan yang belum efektif	Rekam jejak aset sulit ditelusuri keberadaannya	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
24	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	Pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Pegawai Biro
25	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	Risiko Operasional	Penyalahgunaan anggaran	Kerugian APBD	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Kerusakan arsip	Risiko Operasional	Kurang memadainya sarana penyimpanan arsip fisik	Hilangnya informasi penting dan terganggunya administrasi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
27	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	Risiko Operasional	Tidak tersampainya dokumen surat pada bagian administrasi persuratan	Reputasi Biro Bangda menjadi kurang baik	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
28	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	Risiko Operasional	Proses pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan rencana pengadaan	Kualitas barang jasa yang tidak sesuai dapat mengurangi efektifitas kinerja	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

BIRO ORGANISASI

1	Sasaran Program	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	Risiko Kepatuhan	Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi	Pelayanan publik terganggu	Pemerintah Kab/Kota
2	Sasaran Program	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	OPD, Kab/Kota
3	Sasaran Program	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	Risiko Kepatuhan	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	OPD, Pemprov Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Program	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	Risiko Kepatuhan	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	OPD, ASN
5	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	Risiko Fraud	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Biro Organisasi
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen ABK tidak tersusun	Risiko Operasional	Data beban kerja tidak tersedia	Perhitungan kebutuhan pegawai tidak valid	OPD, Kab/Kota
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Data tidak valid atau tidak lengkap	Risiko Operasional	Data kelembagaan tidak mutakhir	Indeks Kematangan Organisasi Daerah tidak menggambarkan kondisi riil kelembagaan di daerah	OPD
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Rekomendasi tidak menjawab kebutuhan riil	Risiko Operasional	Tidak adanya justifikasi kebutuhan organisasi yang kuat	Tumpang tindih tugas antar perangkat daerah baru	Pem Kab/Kota
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Data evaluasi tidak lengkap atau salah input	Risiko Operasional	Kurangnya SDM memahami instrumen evaluasi	Nilai SPBE rendah, tidak mencerminkan kondisi riil	OPD, Pemprov
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	Risiko Operasional	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Kab/Kota, Masyarakat, Pemprov

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Hasil penilaian tidak objektif atau tidak sesuai realisasi	Risiko Operasional	Kesalahan interpretasi dalam pemberian nilai	Nilai RB berpotensi menurun	OPD
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Capaian RB kabupaten/kota rendah	Risiko Operasional	Fasilitasi tidak optimal	Penggunaan laporan hasil fasilitasi sebelumnya	Pem Kab/Kota
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Fasilitasi tidak optimal	Risiko Operasional	Jadwal fasilitasi tidak terlaksana sesuai rencana	Target Nilai SAKIP tidak tercapai	OPD, Kab/Kota
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	Risiko Operasional	Kurangnya pencatatan dan pengawasan barang	Kehilangan barang	Biro Organisasi
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	Risiko Fraud	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Biro Organisasi
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan.	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi.	Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan.	OPD, Kab/Kota
BIRO APBJ								
1	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga	Risiko Kepatuhan	Peserta pemilihan merasa dirugikan	Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda	OPD Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Tidak dipatuhinya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan marketplace (Blangkon Jateng)	Risiko Kemitraan	Terjadinya pengingkaran terhadap perjanjian kerjasama dari pihak market place	PBJ yang dilakukan oleh SKPD tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Penyedia dan SKPD di Lingkup Pemprov Jateng
3	Sasaran Program	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kematangan UKPBJ) Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan target -Terhambatnya capaian UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi level 3 (proaktif)	Risiko Kepatuhan	Banyaknya bukti dukung yang harus dipenuhi sedangkan personil yang dimiliki terbatas	-Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kurang maksimal -UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif)	UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Arsip tersebar di berbagai tempat	Risiko Operasional	kurang sarana penyimpanan arsip fisik	arsip rusak dan hilang	OPD BIRO APBJ
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi	Risiko Operasional	keterbatasan pemahaman Konsolidasi di tingkat OPD	Masih ditemukan potensi kemahalan harga pada barang/jasa dengan spesifikasi yang sama	K/L/PD Khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Terganggunya proses pelaksanaan PBJ	Risiko Operasional	- Kurangnya tingkat pemahaman pelaku PBJ - Permasalahan di sistem / aplikasi	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa Tengah menjadi PKPBJ	Risiko Kepatuhan	Kekurangan/revisi pemenuhan bukti dukung oleh UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) belum semua di approve oleh LKPP	UKPBJ Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 4 (strategis)	Biro APBJ
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Pegawai di Biro APBJ
BIRO UMUM								
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	Risiko Operasional	Kelalaian Penggunaan BMD	Menghambat kegiatan Oprasional	Pimpinan, Pengguna Barang Milik Daerah
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah pimpinan.	Risiko Operasional	Adanya kesalahan sumber data yang diperoleh.	Menurunkan reputasi pimpinan	Perangkat Daerah dan Lembaga/ Organisasi Selain Pemerintahan.
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Editing narasi berita pimda terhambat	Risiko Operasional	Kurangnya pemenuhan data dari OPD teknis	Sebagian kegiatan/ statement pimpinan tidak jadi tayang di media	Pokja Publikasi dan Hubungan Media

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	ASN menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Rendahnya kesadaran ASN dalam memperbarui data tunjangan keluarga	Temuan pemeriksa	ASN Setda Prov. Jateng
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terjaminnya keakuratan Laporan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Kurang tertibnya penginputan data Barang persediaan pada aplikasi SIM Aset	Laporan Barang persediaan pada akhir periode tidak sesuai	Pimpinan, Pengurus Barang
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Tersedianya layanan peminjaman asset pada Biro umum	Risiko Fraud	penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik Pemerintah Daerah	PAD sewa gedung tidak optimal	Pemerintah provinsi Jawa tengah
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan baik	Risiko Operasional	Pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan dalam SHS (Standat Harga Satuan)	Proses pembayaran terhambat	Sub Bagian lain dan Biro-biro lingkup Setda Jateng
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Setda Provinsi Jawa Tengah berupa meubelair	Risiko Operasional	Pembelian barang menunggu reviu TKDN dari Inspektorat	Belum tersedianya Barang ketika diperlukan	Pengguna Barang Milik Daerah
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Pimpinan ASN Provinsi dan Masyarakat	Risiko Operasional	Petugas kebersihan tidak maksimal dalam membersihkan ruangan	Suasana kerja kurang nyaman	Pimpinan dan pegawai SETDA
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terciptanya kondisi kendaraan siap operasional & Legalitas kelengkapan kendaraan lebih terkontrol	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara pemegang kendaraan dengan koordinator servis kendaraan	Pelaksanaan kegiatan terhambat	Pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah & Dinas OPD saat melaksanakan kegiatan di kantor Setda

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima dana penunjang operasional tepat waktu	Risiko Fraud	Berkas pencairan dana penunjang pimpinan tertunda untuk ditandatangani oleh Pimpinan	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Daerah
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah selama 12 Bulan	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Dinamis yang memerlukan kebutuhan yang mendadak	Terdapat keluhan dari pimpinan	Biro Umum, Penyedia Jasa
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Memberikan kontribusi dalam menyajikan data dukung publikasi berupa foto, video dan berita terkait dengan agenda pimpinan daerah	Risiko Operasional	Beberapa lokasi peliputan memerlukan perizinan khusus	Tidak dapat menyajikan publikasi pada lokasi tersebut	Pimpinan Daerah, Pokja Publikasi dan Hubungan Media, Masyarakat
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Agenda Pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar	Risiko Operasional	Dinamika atau perubahan kegiatan Pimpinan yang tinggi	Fasilitasi keprotokolan dan Acara yang dihadiri Pimpinan Daerah dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana awal	Protokol Kementerian Lembaga Daerah, OPD Prov. Jateng, Instansi vertikal, BUMN/BUMD

Lampiran 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
STRATEGIS									
MOU tidak terlaksana	4	5	20	Ada	Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah daerah yang akan mekasanakan kerjasama.	Belum Memadai	3	4	12
Gagal tercapainya kesepakatan batas	4	5	20	Ada	1. Sosialisasi Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Kab/Kota	Belum Memadai	4	4	16
Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani	3	5	15	Ada	Meningkatkan upaya pendokumentasian dalam administrasi pemerintahan	Belum Memadai	2	5	10
Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	4	4	16	Ada	"1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan hibah 2. Monitoring evaluasi pelaksananaan hibah"	Belum Memadai	3	4	12
Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro	3	5	15	Ada	Koordinasi terkait hasil rakor yang sudah menjadi keputusan	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan	4	4	16	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Belum Memadai	4	3	12
Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan	4	4	16	Belum Ada	monitoring dan evaluasi kinerja secara On The Spot ke BUMD	Belum Memadai	3	4	12
Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD	4	4	16	Ada	Melaksanakan Rakor Pengendalian APBD	Belum Memadai	3	4	12
Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	4	4	16	Ada	Penyesuaian Kebijakan Pemberian TPP	Belum Memadai	3	4	12
Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	4	4	16	Ada	Melaksanakan fasilitasi penyusunan Perda/Perkada SOTK	Belum Memadai	4	3	12
Proses pembangunan ZI tidak berjalan	4	4	16	Ada	Melakukan pembinaan pembangunan zona Integritas pada TPI OPD	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/ pihak lain	3	5	15	Ada	Pelaksanaan review HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Belum Memadai	2	5	10
Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda	4	4	16	Ada	Melaksanakan Sosialisasi PEKPPP ke Biro-biro lingkup Setda	Belum Memadai	3	4	12
Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa	3	5	15	Ada	Melakukan pengawasan oleh atasan langsung	Belum Memadai	3	4	12
Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama	4	4	16	Ada	Melaksanakan desk MR	Belum Memadai	4	3	12
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA									
Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai	4	4	16	Ada	Koordinasi secara intensif dengan OPD Provinsi dan kab kota terkait kerjasama luar negeri	Memadai	3	4	12
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	4	4	16	Ada	1. Konsultasi Publik Ulang 2. Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terkena	Memadai	3	4	12
Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan	4	4	16	Ada	Koordinasi dengan Kemendagri	Memadai	3	4	12
Laporan pertanggungjawaban disusun tidak sesuai dengan bukti riil	3	3	9	Ada	Cross check antara SPJ dengan realisasi kegiatan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Keterlambatan LKPJ	4	3	12	Ada	Konsinyering dengan OPD Prov Jateng	Memadai	3	3	9
Masyarakat merasa memiliki Tanah Negara atau Tanah aset milik pemerintah	3	4	12	Ada	Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang merasa menguasai aset	Memadai	3	3	9
Gangguan ketertiban di kantor Gubernur	4	3	12	Ada	Pendekatan secara persuasif dengan koordinator lapangan unjuk rasa	Memadai	3	3	9
Target sertifikasi tanah tidak tercapai	3	3	9	Ada	Sosialisasi terkait PTSL Kab/Kota dengan masyarakat	Memadai	2	3	6
Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur	3	3	9	Ada	Sosialisasi	Memadai	2	3	6
Perangkat Daerah tidak melaksanakan aktivitas dalam mendukung capaian indikator SPM	3	3	9	Ada	Sosialisasi PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM	Memadai	2	3	6
Rencana kerja sama tidak sesuai kebutuhan daerah	3	3	9	Ada	Penyusunan analisis kebutuhan berbasis data dan usulan OPD	Memadai	2	3	6
Ketidakpatuhan terhadap peraturan / kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama	3	4	12	Ada	Sosialisasi regulasi Permendagri no 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaksanaan kerjasama luar negeri kurang maksimal	3	3	9	Ada	Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kab/Kota	Memadai	2	3	6
Evaluas pelakaksanaan kerjasama tidak dapat dilakukan	3	3	9	Ada	Pelaksaaan monev kerjasamma lingkup Provinsi Jawa Tengah	Memadai	2	3	6
BIRO HUKUM									
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	10	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5
Produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya	4	1	4	Ada	melakukan sosialisasi pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum	Memadai	3	1	3
Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang bersengketa	2	3	6	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya	Memadai	1	3	3
Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi	2	4	8	Ada	'- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan LBH - Meningkatkan jumlah LBH yang bekerjasama dengan PemProv	Memadai	1	3	3
Rendahnya nilai capaian pelaksanaan Aksi HAM	2	5	10	Ada	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas Perangkat Daerah melalui rapat evaluasi rutin Aksi HAM	Memadai	1	5	5
Kesalahan atau penundaan kegiatan	3	5	15	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	5	10
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	10	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	10	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum	4	1	4	Ada	Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum	Memadai	3	1	3
Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan	3	1	3	Ada	Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum	Memadai	2	1	2
Hasil analisis dan evaluasi belum banyak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dalam perbaikan produk hukum daerah	2	5	10	Ada	Menyederhanakan format laporan analisis dan evaluasi agar lebih mudah dipahami dan menonjolkan rekomendasi praktis	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Memadai	2	3	6
Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Memadai	2	3	6
Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan tidak optimal	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan di Jateng	Memadai	2	4	8
Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM	3	4	12	Ada	meningkatkan upaya pembinaan HAM di Kabupaten/Kota	Memadai	1	4	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak tertanganinya seluruh permasalahan hukum non-litigasi sesuai target yang ditetapkan	2	3	6	Ada	Menyediakan basis data dan sistem pelaporan kasus non-litigasi secara digital untuk memantau progres penyelesaian	Memadai	1	3	3
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	2	4	8	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan kepegawaian	Memadai	1	4	4
Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	2	4	8	Ada	Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	2	5	10	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan barang milik daerah	Memadai	1	5	5
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	3	4	12	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	4	8
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	4	4	16	Ada	1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan hibah 2. Monitoring evaluasi pelaksanaan hibah	Memadai	3	3	9
Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA	3	4	12	Ada	1. Koordinasi dengan OPD terkait dalam perencanaan hibah 2. Koordinasi dengan pengusul pokir	Memadai	3	3	9
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya	3	5	15	Ada	1. membuat SOP Pelayanan Ketatausahaan	Memadai	3	4	12
Kelengkapan administrasi hibah kurang lengkap sehingga pelaporan terlambat	3	4	12	Ada	1. Rencana pencairan hibah sesuai jadwal perencanaan 2. Sosialisasi Template SPJ dan Pelaporan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Realisasi hibah pada akhir periode	4	3	12	Ada	1. Koordinasi dengan pengusul pokir 2. Surat teguran kepada lembaga perihal laporan pertanggungjawaban hibah	Memadai	3	3	9
Tumpang tindih tugas dan kegiatan yang tidak terlaksana	3	4	12	Ada	1. Koordinasi Tusi masing-masing agar tidak tumpang tindih 2. Pembagian tugas yang sesuai	Memadai	3	3	9
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Memadai	3	3	9
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang, Permasdes & P3AP2KB, Nakertras & Admindak Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	3	5	15	Ada	1. Pencatatan kebutuhan aset per bagian melalui RKBMD 2. Pengajuan permohonan kebutuhan ke Biro Umum 3. Koordinasi Intens	Memadai	3	3	9
Data kepegawaian tidak valid	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bendahara Gaji Biro Umum	Memadai	2	4	8
BIRO PEREKONOMIAN									
Sinkronisasi program/kegiatan Ekonomi Makro menjadi kurang efektif	3	3	9	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	3	2	6
Sinkronisasi program/kegiatan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM menjadi kurang efektif	3	3	9	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	3	2	6
Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral tidak dapat diimplementasikan	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Menurunnya status geopark	4	4	16	Ada	'Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Belum Memadai	4	3	12
Rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan tidak dapat diimplementasikan	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian	Memadai	3	2	6
Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	4	5	20	Ada	Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Belum Memadai	3	5	15
Pengolahan dan penyajian data bidang Ekonomi Makro menjadi kurang efektif dan efisien	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
Pengolahan dan penyajian data bidang PerindagkopUKM menjadi kurang efektif dan efisien	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Permintaan data/kegiatan prioritas di PerindagkopUKM tidak dipenuhi Kab/Kota	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
Pengolahan dan penyajian data bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kurang efektif dan efisien.	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
Data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	3	3	9	Ada	'- Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi	4	4	16	Ada	'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang-undangan bidang cukai	Belum Memadai	4	3	12
Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal	Memadai	3	2	6
Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dari hasil panen	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Penurunan fungsi DAS Prioritas di Jawa Tengah	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Memadai	3	2	6
Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor saja	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Memadai	3	2	6
Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana	3	3	9	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah pada kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi	Memadai	3	2	6
Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro Perekonomian	2	3	6	Ada	Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah	Memadai	2	2	4
BIRO BUMD									
Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)	3	5	15	Ada	Monitoring ke BUMD Jasa Keuangan terkait	Belum Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)	3	5	15	Ada	Monitoring ke BUMD terkait	Memadai	2	5	10
Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD	3	5	15	Ada	Koordinasi dengan BLUD	Belum Memadai	2	5	10
Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro BUMD dan BLUD	2	3	6	Ada	Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah	Memadai	2	2	4
Pemilihan direksi BUMD Keuangan tidak sesuai keahlian	2	5	10	Ada	Dilakukan Beauty Contest pada saat pemilihan pihak ke 3	Memadai	1	3	3
Keterlambatan penginputan laporan kinerja keuangan pada sistem SiPete	2	5	10	Ada	Membuat surat edaran terkait batas penginputan laporan kinerja ke dalam sistem SiPete	Memadai	1	5	5
Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	3	5	15	Ada	Monitoring Kinerja triwulanan BUMD	Belum Memadai	2	5	10
Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	3	5	15	Ada	Membuat ceklist dokumen	Belum Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Keterlambatan Pengumpulan Laporan	3	5	15	Ada	Melakukan pemantauan menggunakan alat komunikasi seperti WA / email	Belum Memadai	2	5	10
Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	4	4	16	Ada	Menyediakan agenda / jadwal secara elektronik	Memadai	3	3	9
BIRO ADM. BANGDA									
Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu	4	4	16	Ada	Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kab/Kota	Belum Memadai	3	4	12
Data kinerja pada e-controlling kinerja tidak valid	4	2	8	Ada	Pelaksanaan monitoring secara berkala kepada OPD, surat tentang notifikasi input capaian kinerja TW	Memadai	3	2	6
Agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja	5	2	10	Ada	Menyusun rekomendasi hasil koordinasi dan pengendalian	Memadai	5	1	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan disimulasikan	3	3	9	Ada	Pemutakhiran sistem E-RKO	Memadai	2	3	6
Informasi yang disajikan pada media informasi Biro tidak relevan	3	4	12	Ada	1. menyusun tim pengelola media informasi digital biro 2. membuat SOP pengelolaan media informasi digital 3. Monev rutin media informasi digital 4. Pengembangan kompetensi tim media informasi digital Biro 5. Mempublikasi konten yang fokusnya terkait Data Pembangunan Daerah	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Indikator kinerja yang ditetapkan tidak selaras dengan regulasi yang mengatur pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	3	4	12	Ada	Desk Penyusunan Dokumen Perencanaan	Memadai	2	4	8
Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap	3	3	9	Ada	Desk/Koordinasi Penyusunan RKO	Memadai	2	3	6
Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan SKPD Pengelola dan DJPB Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	3	9
Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu	3	3	9	Ada	Desk/Koordinasi Penyusunan RKO	Memadai	2	3	6
Data realisasi fisik APBD kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan	4	3	12	Ada	Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD secara berkala melalui Aplikasi e-controlling APBD	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan pelaksana PSN di Jawa Tengah	Memadai	2	3	6
Target keuangan dan fisik RKO berubah	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Subbag Program SKPD	Memadai	2	3	6
Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid	3	2	6	Ada	Koordinasi dengan Subbag Program SKPD sebelum monitoring	Memadai	2	3	6
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	1. Penyusunan Surat Edaran Sekda Kepada Bupati/Walikota 2. Pemantauan progres verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	3	2	6
Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi	4	3	12	Ada	1. Pengumpulan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Desk progres pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran monitoring pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	4	2	8
Proses verifikasi capaian progress pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran monitoring pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	4	2	8
Kendala operasional dalam proses updating data pelaksanaan Bankeu secara manual	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran OPD pengelola kegiatan Bankeu yang diundang dalam Rakor	Memadai	4	2	8
Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	4	5	20	Ada	Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Rekomendasi kebijakan teknis tidak dapat disusun karena kurangnya koordinasi lintas OPD	3	4	12	Ada	Melakukan FGD dengan OPD terkait sesuai dengan isu strategis yang dibahas	Memadai	2	4	8
Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan	4	3	12	Ada	Desk Penyusunan Laporan LKjIP Setda bersama Biro lingkup Setda	Memadai	3	3	9
Hilangnya aset	3	4	12	Ada	1. Penggunaan BA dalam serah terima aset 2. Rekon Aset Biro Bangda 3. Update KIB internal Biro Bangda	Memadai	2	4	8
Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	3	5	15	Ada	1. Pencatatan kebutuhan aset per bagian melalui RKBMD 2. Pengajuan permohonan kebutuhan ke Biro Umum 3. Koordinasi Intens	Memadai	3	3	9
Data kepegawaian tidak valid	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bendahara Gaji Biro Umum	Memadai	2	4	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	3	4	12	Ada	1. Verifikasi 2 lapis internal Biro Bangda dan verifikator Biro Umum 2. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi	Memadai	3	3	9
Kerusakan arsip	3	4	12	Ada	Digitalisasi arsip melalui sistem informasi kearsipan	Memadai	2	3	6
Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	4	4	16	Ada	1. Adanya agenda digital pada kalender pimpinan 2. Adanya informasi agenda kegiatan dengan media elektronik	Memadai	3	3	9
Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	3	4	12	Ada	rekonsiliasi pengadaan aset bersama biro umum	Memadai	2	3	6
BIRO ORGANISASI									
Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	4	4	16	Ada	Melaksanakan visitasi/fasilitasi pembentukan UPTD	Memadai	4	3	12
SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	4	4	16	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata kelola organisasi dan manajemen kepegawaian yang berlaku	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman pentingnya reformasi birorkasi sebagai dasar dalam perbaikan tata kelola dan budaya birokrasi agar RB lebih berdampak langsung kepada masyarakat	Memadai	3	4	12
Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman dan mendorong penerapan sistem kerja sesuai ketentuan.	Memadai	4	3	12
Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	4	4	16	Ada	Penunjukan Pengelola dan Pengurus Barang di setiap OPD	Memadai	4	3	12
Dokumen ABK tidak tersusun	3	4	12	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata kelola organisasi dan manajemen kepegawaian yang berlaku	Memadai	3	3	9
Data tidak valid atau tidak lengkap	4	4	16	Ada	Melaksanakan rakor kelembagaan yang salah satu agendanya adalah pembahasan pemenuhan data yang valid dan relevan dalam hal pengajuan IKOD	Memadai	3	3	9
Rekomendasi tidak menjawab kebutuhan riil	4	4	16	Ada	Telaah staf sesuai regulasi dan kebutuhan riil daerah	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Data evaluasi tidak lengkap atau salah input	3	4	12	Ada	- Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi SPBE - Identifikasi instrumen evaluasi pemerintahan digital yang telah dikonversikan dari indeks SPBE	Memadai	3	3	9
Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	4	4	16	Ada	Meningkatkan komitmen Kepala Daerah di Jateng dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Belum Memadai	3	4	12
Hasil penilaian tidak objektif atau tidak sesuai realisasi	4	4	16	Ada	Menyelenggarakan workshop pemahaman indikator RB	Memadai	3	3	9
Capaian RB kabupaten/kota rendah	4	4	16	Ada	Menyelenggarakan workshop pemahaman indikator RB	Memadai	3	3	9
Fasilitasi tidak optimal	4	4	16	Ada	Menambah frekuensi pendampingan daring dan tatap muka	Memadai	3	3	9
Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	4	3	12	Ada	Inventarisasi barang milik daerah berkala	Memadai	3	3	9
Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	4	4	16	Ada	Adanya mekanisme permintaan perbaikan barang melalui pengurus barang.	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan.	4	4	16	Ada	Telah dilakukan fasilitasi beberapa jenis pengembangan kompetensi terhadap sebagian kecil ASN.	Belum Memadai	4	3	12
BIRO APBJ									
Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga	3	5	15	Ada	Melakukan review dokumen dengan teliti dan cermat antara PPK dan Pokja. - Menetapkan pedoman (petunjuk teknis) standar evaluasi dokumen pemilihan. - Sosialisasi/Fasilitasi peratran dibidang PBJ.	Memadai	3	4	12
Tidak dipatuhinya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan marketplace (Blangkon Jateng)	3	4	12	Ada	Melakukan monitoring dan evaluasi kepada marketplace yang akan bekerjasama melalui Program Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah) mulai dari persiapan bergabung sampai dengan pelaksanaan kerjasama	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kematangan UKPBJ) Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan target Terhambatnya capaian UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi level 3 (proaktif)	2	4	8	Ada	Melakukan mentoring, koordinasi dan mendorong UKPBJ di wilayah Provinsi Jawa Tengah agar segera melengkapi bukti dukung	Memadai	1	4	4
Arsip tersebar di berbagai tempat	3	3	9	Ada	Melakukan penataan arsip semaksimal mungkin sesuai kaidah2 penataan arsip	Memadai	2	2	4
Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan (LKPP) dan Seluruh User (SKPD)	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Terganggunya proses pelaksanaan PBJ	4	3	12	Ada	Pendampingan pelaksanaan dan penanganan permasalahan terhadap penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik beserta Sistem Pendukungnya (SPSE, eKatalog, SiRUP, SIKAP, Toko Daring)	Memadai	2	3	6
Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa Tengah menjadi PKPBJ	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan LKPP RI untuk membahas pemenuhan data dukung yg sudah di upload pada siukpbj	Memadai	1	3	3
Data kepegawaian tidak valid	2	3	6	Ada	melakukann koordinasindengan pegawain terkait	Memadai	2	2	4
BIRO UMUM									
Terjadinya kerusakan BMD	4	4	16	Ada	Mengajukan daftar kendaraan yang akan di asuransikan	Memadai	3	4	12
Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah pimpinan.	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan LS (Leading Sector)	Memadai	2	3	6
Editing narasi berita pimda terhambat	2	4	8	Ada	Mempunyai SK Narahubung antar lembaga	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
ASN menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	3	3	9	Ada	Membagikan SKUMPTK kepada pegawai yang di isi secara periodik	Memadai	2	3	6
Terjaminnya keakuratan Laporan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	4	3	12	Ada	Melaksanakan rekonsiliasi barang persediaan setiap triwulan	Memadai	3	3	9
Tersedianya layanan peminjaman asset pada Biro umum	3	4	12	Ada	melakukan pengawasan oleh atasan langsung	Memadai	2	2	4
Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan baik	3	2	6	Ada	Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan terkait regulasi SHS	Memadai	2	2	4
Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Setda Provinsi Jawa Tengah berupa meubelair	4	3	12	Ada	Penyusunan dokumen RKBMD secara akurat	Memadai	3	3	9
Pimpinan ASN Provinsi dan Masyarakat	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa untuk peningkatan kinerja petugas kebersihan	Memadai	2	3	6
Terciptanya kondisi kendaraan siap operasional & Legalitas kelengkapan kendaraan lebih terkontrol	3	3	9	Ada	Pengecekan service secara berkala mobil dinas dan berkoordinasi dengan driver	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima dana penunjang operasional tepat waktu	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan TU Pimpinan perihal pengajuan BOP tepat waktu	Memadai	1	4	4
Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah selama 12 Bulan	1	3	3	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Memberikan kontribusi dalam menyajikan data dukung publikasi berupa foto, video dan berita terkait dengan agenda pimpinan daerah	1	4	4	Ada	Koordinasi dengan LS (Leading Sector)	Memadai	1	3	3
Agenda Pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar	3	3	9	Ada	Mediasi dan koordinasi dengan Leading Sector	Memadai	3	2	6

LAMPIRAN 3
RISIKO PRIORITAS

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
STRATEGIS				
MOU tidak terlaksana	12	Sekretaris Daerah	Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.
Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Sekretaris Daerah	Perbedaan arah kebijakan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah
Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani	10	Sekretaris Daerah	Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum	kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	12	Kepala Biro Kesra	Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan
Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro	12	Kepala Biro Perekonomian	Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan	12	Kepala Biro Perekonomian	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampuan dan stakeholder terkait
Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan	12	Kepala Biro BUMD dan BLUD	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD
Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD	12	Kepala Biro Adm Bangda	Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan	Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan
Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Kepala Biro Organisasi	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran
Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Kepala Biro Organisasi	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan
Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Kepala Biro Organisasi	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik
Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/ pihak lain	10	Kepala Biro PBJ	Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender	Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda	12	Sekretaris Daerah	Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid	Nilai PEKPPP Setda rendah
Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa	12	Kepala Biro Umum	Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.	PAD sewa gedung tidak optimal
Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama	12	Kepala Biro Adm Bangsa	Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda	Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal
BIRO PEMOTDAKER				
Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai	12	Biro Pemotdaker	Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian	Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	12	Biro Pemotdaker	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan
Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan	12	Biro Pemotdaker	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD	Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
BIRO HUKUM				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Kepala Biro Hukum	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Kepala Biro Hukum	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya	12	Koordinator Bidang Keagamaan	Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah
BIRO PEREKONOMIAN				
Menurunnya status geopark	12	Kepala Biro Perekonomian	Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan
Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	15	Kepala Biro Perekonomian	Penyalahgunaan anggaran	Kerugian APBD

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi	12	Pengarah Pertanian	Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT	Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana
BIRO BUMD DAN BLUD				
Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)	10	Kepala Biro BUMD dan BLUD	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat
Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)	10	Kepala Biro BUMD dan BLUD	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat
Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD	10	Biro BUMD dan BLUD	Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD	Tidak berkembangnya kinerja BLUD

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Kepala Biro BUMD dan BLUD	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah
Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Biro BUMD dan BLUD	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak
Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Biro BUMD dan BLUD	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan □
BIRO ADM. BANGDA				
Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan	Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	16	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat
BIRO ORGANISASI				
Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	12	Biro Organisasi	Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi	Pelayanan publik terganggu
SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Biro Organisasi	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi
RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	Biro Organisasi	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan
Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Biro Organisasi	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya
Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Kepala Biro	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah
Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Biro Organisasi	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Biro Organisasi	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan
Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan.	12	Subbag Tata Usaha	Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi.	Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan.
BIRO APBJ				
Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga	12	Kepala Biro PBJ	Peserta pemilihan merasa dirugikan	Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda
BIRO UMUM				
Terjadinya kerusakan BMD	12	Kepala Biro	Kelalaian Penggunaan BMD	Menghambat kegiatan Oprasional

LAMPIRAN 4
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
STRATEGIS								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MOU tidak terlaksana	12	Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintah dan Kesra	September 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan arah kebijakan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daerah antar Kab/kota	Asisten Pemerintah dan Kesra	November 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani	10	Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum	kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko	Asisten Pemerintah dan Kesra	Triwulan IV 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	12	Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	NPHD ; Monitoring, evaluasi dan sosialisasi	Asisten Pemerintah dan Kesra	Triwulan II dan IV 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro	12	Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota	- Monev pelaksanaan hasil rekomendasi - FGD pembahasan isu terkini terkait bidang ekonomi makro	Asisten ekonomi Pembangunan	- TW II (Mei) - TW IV (Nopember)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan	Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait	- Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal, diantaranya pada SPPG - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terhadap keamanan pangan seperti diantaranya terhadap bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG	Asisten Ekonomi Pembangunan	- TW I (Maret) - TW II (Juni)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan	12	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD	Asisten Ekonomi Pembangunan	2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD	12	Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan	Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan	1. Melaksanakan pemantauan langsung di lapangan secara rutin/berkala 2. Desk validasi data pelaporan	Asisten Ekonomi Pembangunan	2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Evaluasi instrumen pemberian TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah.	Asisten Administrasi	Triwulan III s.d IV

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	Triwulan I 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	Triwulan IV 2026
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/pihak lain	10	Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender	Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai	Dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan-peraturan Pengadaan Barang/Jasa	Asisten Administrasi	TW II 2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda	12	Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid	Nilai PEKPPP Setda rendah	1. Melaksanakan Konsinyering penyempurnaan instrumen 2. Melakukan Evaluasi berkala pada PEKPPP Setda	Asisten Administrasi	TW III 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa	12	Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.	PAD sewa gedung tidak optimal	Menyusun SOP peminjaman dan Pembayaran sewa	Asisten Administrasi	Semester I Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama	12	Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda	Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal	Melaksanakan konsinyering penyusunan Manajemen risiko	Asisten Administrasi	TW II 2026
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA								
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai	12	Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian	Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak	Musyawarah dengan para pihak perihal permasalahan substansi kerjasama	Kepala Biro Pemotda KS	Triwulan III 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	12	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	Perubahan trase/desain	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Triwulan IV 2026
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan	12	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD	Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menyusun Surat Edaran kepada OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Triwulan II 2026
BIRO HUKUM								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	penggunaan aplikasi persuratan dengan baik dan benar	Kepala Biro	Triwulan I

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	menyusun SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	Kepala Biro	Triwulan I
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Tidak didatarkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya	12	Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah	1. Monev rutin 2. Pengembangan kompetensi ASN biro 3. Mengalokasikan anggaran untuk menduk kegiatan rumah tangga Biro	Kepala Biro Kesra	TW I, II, III, IV
BIRO PEREKONOMIAN								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	Menurunnya status geopark	12	Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan geopark dengan melibatkan stakeholder mitra (utamanya Badan Pengelola Geopark) - Melakukan promosi Geopark melalui media sosial	Pengarah LHKESDM	- TW II (Juni) - TW IV (Desember)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel	15	Penyalahgunaan anggaran	Kerugian APBD	- Melakukan monitoring pelaksanaan SOP terkait Penatausahaan Keuangan - internalisasi nilai-nilai anti korupsi	Kepala Biro Perekonomian	- TW I (Maret) - TW II (Juni)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi	12	Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT	Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana	- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan - Menyelenggarakan asistensi penyusunan RKA/RKP kegiatan DBHCHT - Menyusun bahan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan DBHCHT Kab/Kota	Pengarah Pertanian	- TW I (Januari) - TW IV (Desember)
BIRO BUMD								
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)	10	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Keuangan	Kepala Biro BUMD dan BLUD	November 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)	10	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Jasa Aneka Usaha	Kepala Biro BUMD dan BLUD	November 2026
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase nilai kemandirian BLUD	Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD	10	Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD	Tidak berkembangnya kinerja BLUD	melakukan monitoring terkait kebijakan	Kepala Biro BUMD dan BLUD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	Desk tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan	Pengarah BUMD Jasa Aneka Produksi	Triwulan II

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak	Bentuk tim khusus dengan perwakilan dari semua unit terkait	Pengarah BLUD	Triwulan IV
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	☐ Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal	Membuat surat tentang batas pengumpulan laporan	Pengarah BUMD Jasa Anek Usaha	Triwulan IV
BIRO ADM. BANGDA								
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi bantuan keuangan	Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu	12	Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan	Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut	1. Percepatan proses verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026 2. Monitoring progres percepatan penyelesaian kegiatan Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Perubahan TA. 2026	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah	TW IV Tahun 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	16	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat	Melakukan pencermatan progres pelaporan pada aplikasi bantuan keuangan kepada desa. Desa mana yang belum sama sekali melaporkan, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke kantor desa tersebut dan dilakukan uji sampel ke lokasi kegiatan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	TW II Tahun 2026
BIRO ORGANISASI								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	12	Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi	Pelayanan publik terganggu	Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kab/Kota secara terstruktur, terukur, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan III dan IV
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	Mempedomani SKJ sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk SKJ manajerial sesuai KepmenpanRB 409/2020, SKJ Jabatan Pelaksana sesuai KepmenpanRB nomor 01/2025, dan SKJ Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Instansi Teknis JF terkait	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan I

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD	Kepala Biro Organisasi	Triwulan IV
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	Fasilitasi penerapan sistem kerja (pembuatan SK Kelompok Kerja dan penyesuaian proses bisnis dan SOP)	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.	Kepala Biro	Triwulan I
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan IV

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Tanda tangan pejabat berwenang pada berita acara perbaikan.	Kasubbag Tata Usaha	Triwulan I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan.	12	Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi.	Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan.	Menyusun dokumen pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional sesuai standar kompetensi.	Pengarah/Ketua Pokja	Triwulan I
BIRO APBJ								

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga	12	Peserta pemilihan merasa dirugikan	Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda	Melakukan review dokumen dengan teliti dan cermat antara PPK dan Pokja. - Menetapkan pedoman (petunjuk teknis) standar evaluasi dokumen pemilihan. - Meningkatkan Kompetensi JF PBJ melalui pelatihan, seminar, FGD, dsb.	Kepala Biro APBJ	TW 1 2026
BIRO UMUM								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	12	Kelalaian Penggunaan BMD	Menghambat kegiatan Oprasional	Membeikan bukti surat izin penggunaan kendaraan bermotor	Kepala Biro	Semester I dan Semester II Tahun 2026